



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DI PROVINSI JAMBI**

TESIS

**DEDY TRI HARIYANTO
NPM : 0906586442**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DI PROVINSI JAMBI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**DEDY TRI HARIYANTO
NPM : 0906586442**

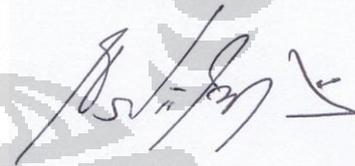
**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

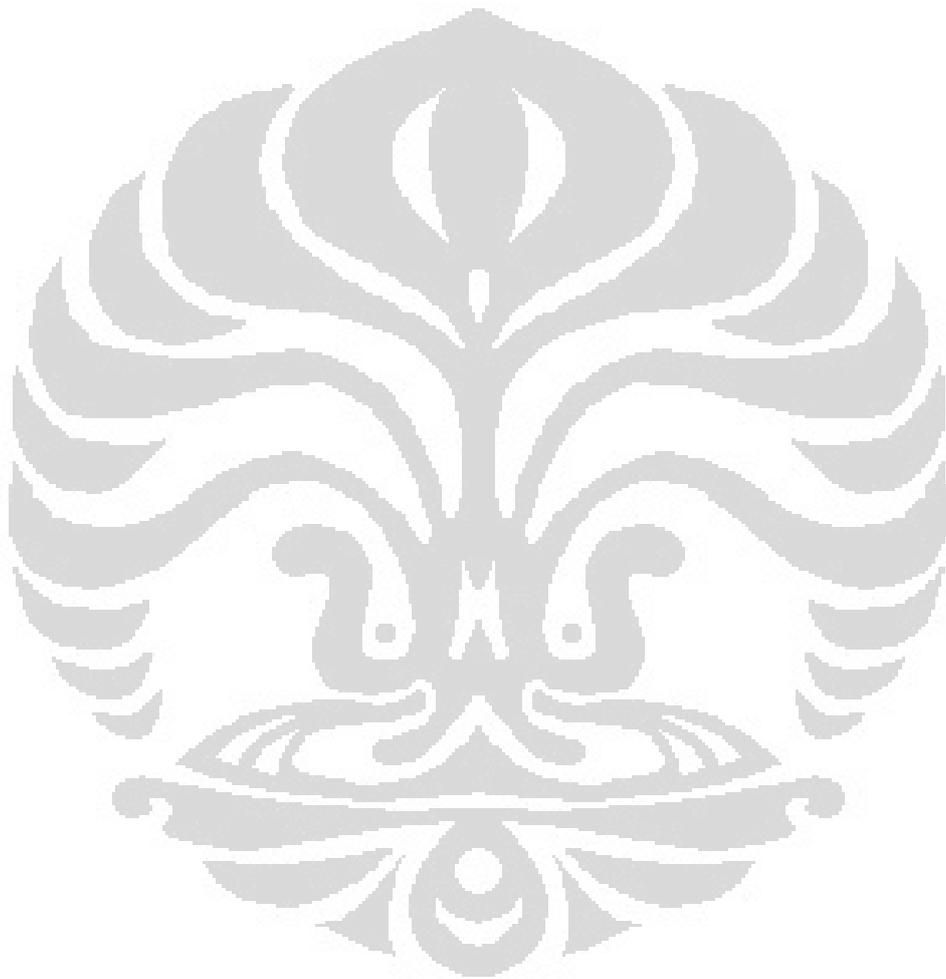
Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2012



Dedy Tri Hariyanto





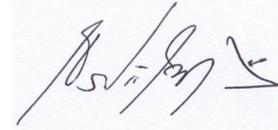
KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis selalu panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi”** yang disusun sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan materiil dan moril baik berupa kerjasama, bimbingan, arahan ataupun kritik sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

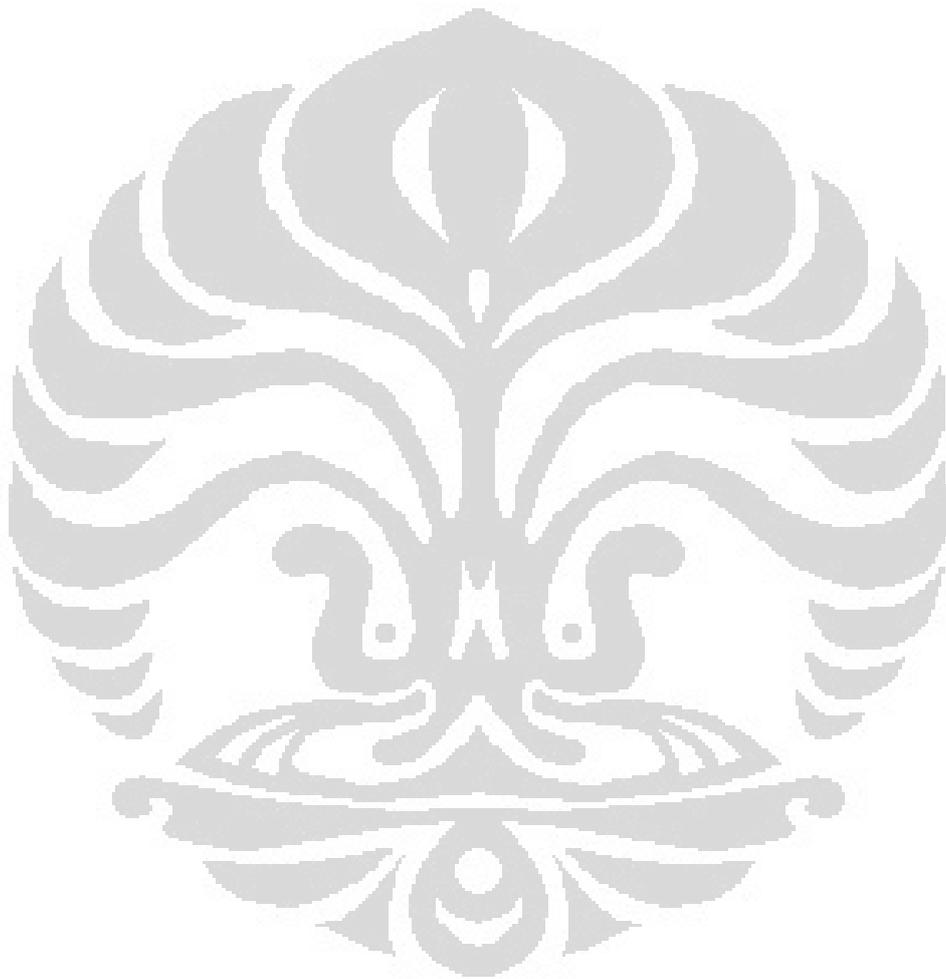
Penulis percaya bahwa akhir dari suatu proses merupakan awal dari proses berikutnya. Demikian halnya dengan akhir dari proses penelitian yang tertuang dalam bentuk tesis ini, merupakan awal bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih baik. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dan semoga kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tesis ini dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat lebih bermanfaat.

Jakarta, Januari 2012



Penulis



ABSTRAK

Nama : Dedy Tri Hariyanto
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Jambi

Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya.

Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi *Fixed Effect*. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal *pasca* tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

Kata kunci:

Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jambi

ABSTRACT

Name : Dedy Tri Hariyanto
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Growth in Province of Jambi.

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009). The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, *post* 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi.

Keywords:

Fiscal Decentralization, Economic Growth, Jambi Province

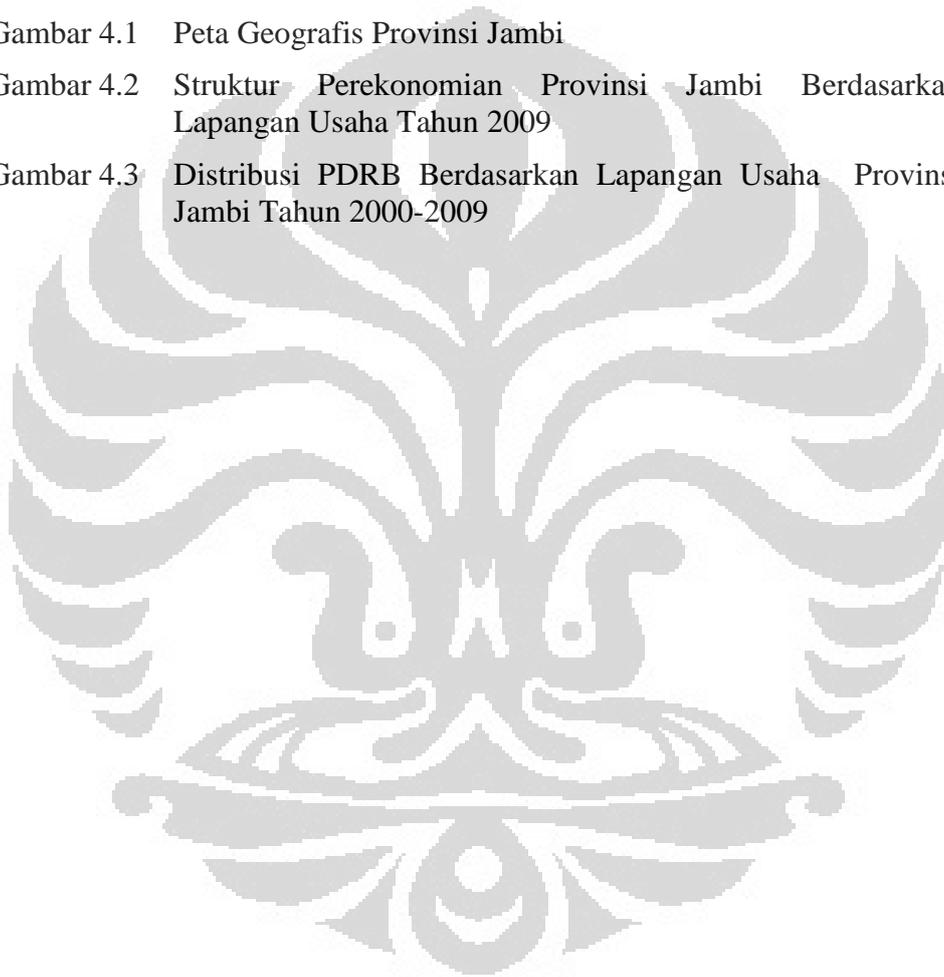
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup	10
1.6. Kerangka Analisis dan Pengembangan Hipotesis	10
1.7. Sistematika penulisan	13
2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.1. Investasi	15
2.1.2. Akumulasi modal Manusia	17
2.1.3. Level Awal GDP	20
2.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	21
2.3. Studi Empiris tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	27
3. METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2. Variabel dan Spesifikasi Model Penelitian	37
3.2.1. Variabel Penelitian	37
3.2.2. Spesifikasi Model Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Metode Analisis dan Pengolahan Data	41
3.4.1. Metode Estimasi	41
3.4.2. Uji Spesifikasi Model	46

4. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI	49
4.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif	49
4.2. Penduduk dan Tenaga kerja	50
4.3. Perekonomian Daerah Provinsi Jambi	53
4.3.1. Struktur Perekonomian	53
4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi	56
4.3.3. Perkembangan Investasi	58
4.4. Keuangan Daerah	58
5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
5.1. Hasil Analisis Data	62
5.1.1. Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jambi	62
5.1.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi	67
5.1.2.1. Hasil Pengujian Metode Analisis	67
5.1.2.2. Hasil Estimasi Model Ekonometrika	69
5.1.2.3. Uji Asumsi Klasik	74
5.2. Pembahasan	75
5.2.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi	75
5.2.2. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi	83
6. KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2008	4
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 1995-2000 (Sebelum Desentralisasi Fiskal)	8
Gambar 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2002-2009 (Setelah Desentralisasi Fiskal)	9
Gambar 1.4	Kerangka Analisis	11
Gambar 4.1	Peta Geografis Provinsi Jambi	49
Gambar 4.2	Struktur Perekonomian Provinsi Jambi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2009	54
Gambar 4.3	Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2000-2009	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Dana Perimbangan pada Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2003-2008	6
Tabel 1.2	Perkembangan Alokasi Dana Pemerintah Pusat pada Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 1995/1996-2000/2001	7
Tabel 2.1	Daftar Studi Empiris Tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009	50
Tabel 4.2	Tingkat kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009	51
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990-2009	52
Tabel 4.4	Penduduk Usia Kerja Provinsi Jambi Tahun 2009	53
Tabel 4.5	Distribusi PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Penggunaan Tahun 2000-2009	55
Tabel 4.6	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Sektor Tahun 2001-2009	57
Tabel 4.7	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2009	57
Tabel 4.8	Pekembangan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1995-2008	60
Tabel 4.9	Pekembangan Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 1995-2008	61
Tabel 5.1	Pekembangan Penerimaan Dana Perimbangan dan Kontribusinya terhadap Total penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2001-2008	63
Tabel 5.2	Pekembangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Kontribusinya terhadap Total penerimaan Daerah Tahun 2001-2008	64
Tabel 5.3	Pekembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2001-2008	65
Tabel 5.4	Komposisi Realisasi Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2008	66
Tabel 5.5	Hasil Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> melalui Uji-F	68
Tabel 5.6	Hasil Signifikansi <i>Random Effect</i> melalui Uji Hausman	68
Tabel 5.7	Hasil Regresi Variabel kontrol dengan Metode <i>Fixed Effect</i>	70
Tabel 5.8	Hasil Regresi Variabel kontrol dengan Variabel <i>dummy</i> Desentralisasi Fiskal menggunakan Metode <i>Fixed Effect</i>	71
Tabel 5.9	Ikhtisar Hasil Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal yang berinteraksi dengan Variabel <i>dummy</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Regresi Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi
- Lampiran 2 Hasil Regresi Pengaruh Variabel Dummy Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi
- Lampiran 3 Hasil Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal yang berinteraksi dengan Variabel *dummy* dengan menggunakan Metode *Fixed Effect*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai dengan saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan isu yang tetap menarik untuk didiskusikan, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi bahasan di ranah ekonomi, tetapi juga ranah lain seperti: politik, administratif, dan geografis. Salah satu isu penting yang selalu menarik untuk didiskusikan dalam hubungan antara desentralisasi fiskal pada ranah ekonomi adalah apakah desentralisasi fiskal berhubungan positif atau negatif dengan pertumbuhan ekonomi? Dari berbagai studi yang pernah dilakukan memang terdapat ambiguitas hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998), Zhang dan Zou (1998), dan Xie, et all (1999) sampai pada simpulan bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Davoodi dan Zou (1998) dalam penelitiannya atas 46 negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan analisis data panel selama periode tahun 1970 sampai dengan tahun 1989 menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dan tingkat kemajuan ekonomi di negara negara industri, sedangkan untuk negara-negara berkembang semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka kinerja ekonomi akan semakin tereduksi. Sementara Xie, et al. (1999) dalam penelitiannya pada negara bagian di Amerika Serikat selama periode tahun 1948 sampai dengan tahun 1994 membuktikan bahwa desentralisasi fiskal kurang menguntungkan bagi pembangunan. Simpulan yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Zhang dan Zou (1998) yang mengobservasi pertumbuhan ekonomi regional di China dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan tahun 1992, yaitu bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002), Thiessen (2003), dan Desai et al. (2003), yang berkesimpulan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Akai dan Sakata (2002) dalam risetnya di 50 Negara Bagian Amerika pada periode 1992-1996 menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Amerika Serikat memiliki kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja ekonomi negara bagian. Demikian juga hasil penelitian Desai et al. (2003) yang mengklaim bahwa otonomi fiskal di Rusia memberikan stimulus bagi pemulihan produksi nasional. Hasil riset Thiessen (2003) di negara-negara OECD pada periode 1973-1998 menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal mengikuti pola sebuah lonceng (*bell shaped*), dimana terdapat hubungan positif pada saat derajat desentralisasi masih rendah, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi maka hubungannya menjadi negatif. Sementara itu beberapa penelitian lain seperti Woller dan Phillips (1998), serta Baskaran dan Feld (2009) gagal mendapatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menggunakan model analisis ekonometrika, juga menghasilkan simpulan yang berbeda. Di satu pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil penelitian Wibowo (2008), dan Waluyo (2007). Sementara hasil penelitian Swasono (2007) berkesimpulan sebaliknya, bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

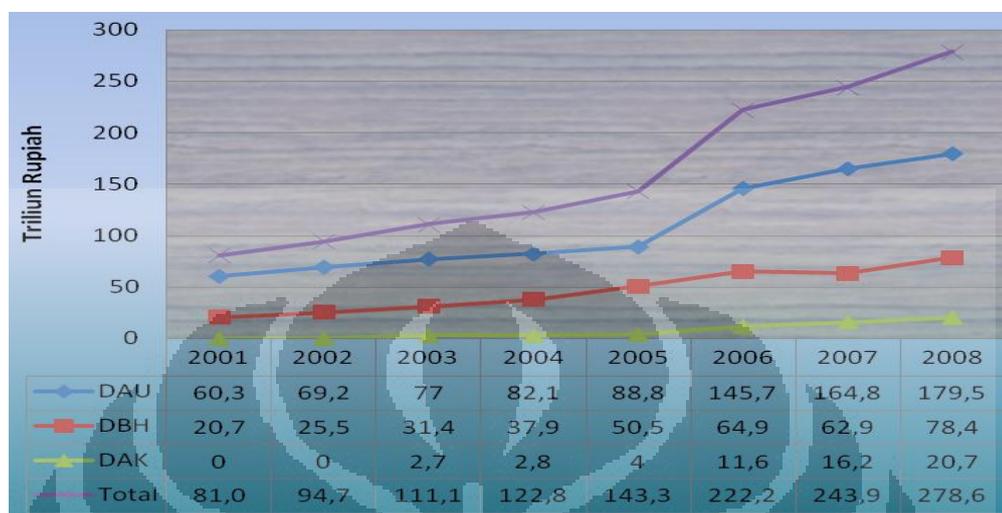
Terlepas dari hasil studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang beragam tersebut, desentralisasi fiskal telah menjadi kecenderungan di banyak negara. Pengamatan terkini sebagaimana dikemukakan Robert (2010) menunjukkan bahwa 63 dari 75 negara berkembang dan transisional telah dan sedang melaksanakan proses desentralisasi fiskal, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Hal tersebut boleh jadi menyiratkan harapan dari negara-negara tersebut bahwa dengan implementasi desentralisasi fiskal akan dapat terwujud efisiensi ekonomi sehingga mendorong kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, awal era baru desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulai dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan sentralistis yang dianut dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Desentralisasi fiskal di Indonesia di era setelah kekuasaan Orde Baru secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 2001. Dalam implementasinya peraturan perundangan yang mendukungnya tidak sekaligus sempurna, sehingga dirasakan oleh pemerintah sendiri maupun parlemen untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 2004 dikeluarkan undang undang otonomi daerah yang baru, yakni Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan terbitnya undang - undang tersebut di atas, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal--yakni hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, maupun hubungan secara horisontal antara eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan yang paling nyata dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pemberian kewenangan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus pemerintahan. Sebagian besar urusan pemerintah telah diserahkan kepada daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan yang semakin luas tersebut, maka daerah dituntut untuk melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan prinsip *money follow function* dalam desentralisasi fiskal, maka untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepada setiap daerah diberikan sumber-sumber pendanaan terutama melalui transfer atau dana perimbangan. Hal ini tentunya membawa implikasi langsung berupa kebutuhan dana yang cukup besar.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1. Perkembangan Dana Perimbangan tahun 2001-2008

Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan RAPBN 2009 dan 2010.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada awal desentralisasi fiskal transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan hanya sebesar Rp. 81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen di tahun 2002 menjadi Rp. 94,7 triliun. Tahun 2006 Dana Perimbangan mencapai Rp. 222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008, besarnya dana perimbangan telah mencapai Rp. 278,7 triliun. Sementara itu, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dimana untuk tahun 2008 DBH mencapai Rp. 78,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan DBH tahun 2001 yang sebesar Rp. 20,7 triliun. Secara proporsi, DBH ini juga mengalami peningkatan, yakni dari 25,5 persen di tahun 2001 menjadi sebesar 28,1 persen dari total dana perimbangan pada tahun 2008. Begitu juga jika dilihat pada transfer DAK tahun 2008 yang telah mencapai Rp. 20,7 triliun. Jumlah DAK ini jauh lebih besar dibanding DAK tahun 2003 yang hanya sebesar 2,7 triliun, bahkan pada tahun 2001 dan 2002, transfer DAK ini belum dialokasikan ke dalam dana perimbangan untuk pemerintah daerah.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan untuk menjalankan urusan/kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah tersebut, maka selaras

dengan esensi otonomi daerah, besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal ini antara lain terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi regional, dimana setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan PDRB riil menunjukkan variasi antar daerah yang masih relatif tinggi. Hal tersebut memperlihatkan indikasi awal bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Selain transfer ke daerah yang mengalami peningkatan secara drastis, desentralisasi dan otonomi daerah juga diwarnai dengan fenomena pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru. Jika pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 provinsi, maka pada tahun 2006 bertambah menjadi 33 provinsi. Begitu juga dengan daerah kabupaten yang semula hanya berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2006 mencapai 348 kabupaten. Sedangkan daerah kota yang semula berjumlah 70 menjadi 86 daerah di tahun 2006. Pada Tahun 2008 jumlah daerah tingkat II telah mencapai jumlah 483, yang terdiri dari 387 kabupaten dan 96 kota.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, implementasi desentralisasi di Provinsi Jambi juga ditandai dengan euforia pemekaran wilayah. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang merespon dengan cepat terbitnya Undang Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 dan merupakan salah satu provinsi yang melakukan pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif cukup signifikan, dimana hampir seluruh kabupaten di Provinsi Jambi dilakukan

pemekaran wilayah. Sehingga kabupaten/kota yang sebelumnya hanya berjumlah enam kabupaten/kota, berkembang menjadi sepuluh kabupaten/kota karena adanya pemekaran wilayah atau pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB).

Dengan bertambahnya wilayah administrasi di Provinsi Jambi, ditambah dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus pemerintahan, yang diiringi penyerahan/pemberian dana untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, maka jumlah dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan Dana Perimbangan pada Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2003-2008 (Setelah Desentralisasi Fiskal)

(dalam juta rupiah)

Tahun	DBH	DAU	DAK	Jumlah
2003		1.373.520,00	665,00	1.374.185,00
2004	-	1.424.258,00	7.852,00	1.432.110,00
2005	443.535,00	1.561.579,00	11.054,00	2.016.168,00
2006	870.367,00	2.424.991,00	200.355,00	3.495.713,00
2007	1.019.906,00	2.718.521,00	365.218,00	4.103.645,00
2008	1.091.097,00	2.912.099,00	396.003,00	4.399.199,00
Total	3.424.905,00	12.414.968,00	981.147,00	16.821.020,00
Rata-Rata	570.817,50	2.069.161,33	163.524,50	2.803.503,33

Sumber: www.tkp2e-dak.org

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi meningkat dari Rp 1,374 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 4,399 triliun pada tahun 2008, atau rata-rata Rp 2,803 Triliun per tahun. Jumlah tersebut meningkat secara drastis bila dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal, dimana dana pemerintah pusat yang diterima oleh pemda di wilayah Provinsi Jambi dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Sumbangan/Subsidi Daerah Otonomi, dan Bantuan Pembangunan dalam 5 tahun terakhir sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal rata-rata hanya

sebesar Rp 417,042 milyar per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2, berikut:

Tabel 1.2. Perkembangan Alokasi Dana Pemerintah Pusat pada Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 1995/1996-2000/2001 (Sebelum Desentralisasi Fiskal)

(dalam juta rupiah)

Tahun Anggaran	DBH	Sumbangan/ Subsidi Daerah otonom	Bantuan Pembangunan	Total
1995/1996	47.571,79	123.341,46	127.681,55	298.594,80
1996/1997	60.269,80	140.328,34	132.852,96	333.451,10
1997/1998	65.130,71	166.844,60	159.149,97	391.125,28
1998/1999	70.916,55	156.276,26	175.600,90	402.793,70
1999/2000	71.196,37	275.726,69	193.848,36	540.771,42
2000/2001	83.980,97	264.558,44	186.976,95	535.516,36
Total	399.066,19	1.127.075,79	976.110,70	2.502.252,68
Rata-Rata	66.511,03	187.845,97	162.685,12	417.042,11

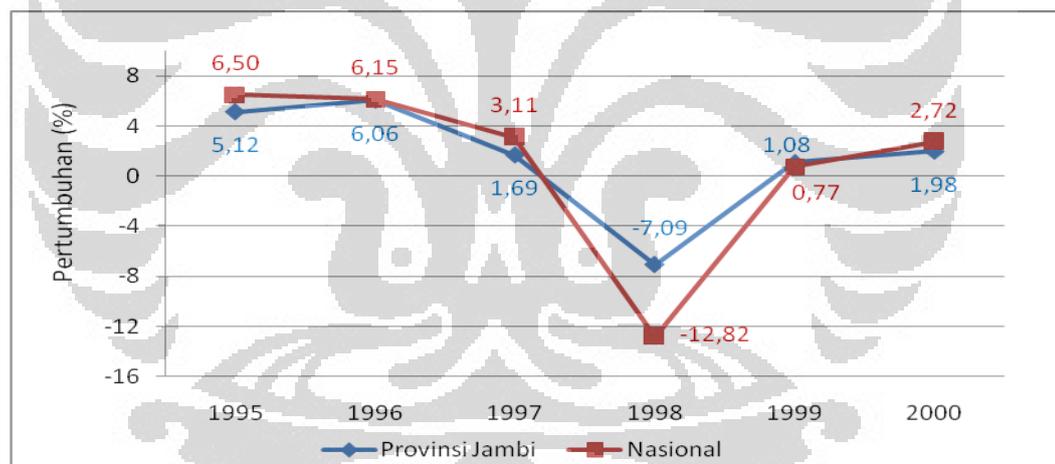
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Dengan peningkatan dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal, terdapat fenomena menarik dari perekonomian daerah di Provinsi Jambi yaitu kondisi makro ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi *pasca* pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menunjukkan gejala yang relatif baik jika dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah, salah satunya dilihat dari pertumbuhan *output* perekonomian daerah yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil, dimana selama periode 1993-2000 (sebelum desentralisasi fiskal) perekonomian daerah di Provinsi Jambi hanya tumbuh pada tingkat 1,67% per tahun, lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 2,54% (Bank Indonesia, 2010). Setelah hampir sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, percepatan aktivitas

perekonomian Provinsi Jambi telah mulai menggeliat dengan laju pertumbuhan mencapai 5,59% per tahun pada periode 2000-2007 menempati urutan tertinggi ketiga di Sumatera setelah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, dan pada tahun 2008 dan 2009 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mencapai 7,16% dan 6,37%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2010). Sedangkan dilihat dari PDRB riil per kapita, walaupun secara nominal PDRB riil per kapita Provinsi Jambi baik sebelum dan setelah era desentralisasi fiskal masih di bawah PDRB riil per kapita nasional, namun dilihat dari tingkat pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara periode sebelum dan setelah era desentralisasi fiskal.

Secara umum tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita Provinsi Jambi pada periode sebelum desentralisasi fiskal masih berada di bawah tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita nasional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut:



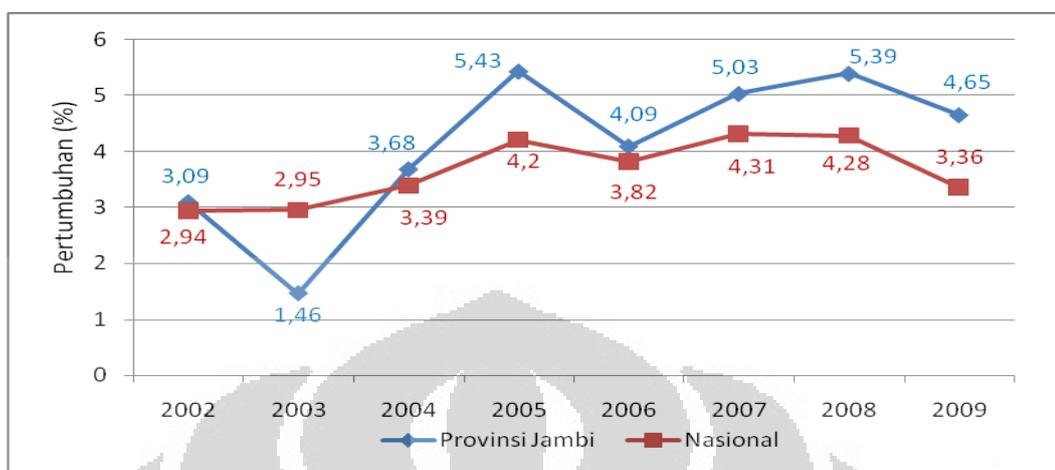
Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 1995-2000 (Sebelum Desentralisasi Fiskal)

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 1996, 1999, 2001, data diolah.

Gambar di atas menunjukkan bahwa kecuali untuk periode krisis keuangan tahun 1998, tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita Provinsi Jambi masih berada di bawah tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita nasional.

Sedangkan setelah era desentralisasi fiskal, secara umum tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita Provinsi Jambi berada di atas tingkat

pertumbuhan PDRB riil per kapita nasional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3. berikut:



Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2002-2009 (Setelah Desentralisasi Fiskal)

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2004, 2007, 2010, data diolah.

Gambar di atas menunjukkan bahwa kecuali untuk tahun 2003, tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita Provinsi Jambi berada di atas tingkat pertumbuhan PDRB riil per kapita nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat euforia desentralisasi di Provinsi Jambi yang terjadi begitu luas, sementara di sisi lain perekonomian daerah *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001 menunjukkan gejala perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal, dan merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya dimana desentralisasi fiskal bisa berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi? dan Bagaimanakah dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk : (1) menganalisis implementasi kebijakan

desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi; (2) menganalisis dan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi; dan (3) Menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris atas dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan evaluasi awal bagi semua pihak yang ingin mengkaji efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan desentralisasi fiskal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terakhir, diharapkan tesis ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian dibatasi pada pengaruh desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Sedangkan periode analisis mencakup periode 15 tahun, yaitu 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009.

1.6 Kerangka Analisis dan Pengembangan Hipotesis

Untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya perlu memperhatikan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengabaian terhadap faktor-faktor atau variabel kontrol yang kemungkinan memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi akan memberikan simpulan yang bias tentang hubungan atau dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori pertumbuhan dan hasil studi empiris sebelumnya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa variabel yang merupakan determinan dari pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan Level Awal Pertumbuhan (Level Awal GDP), sebagaimana analisis Woller dan Phillips (1998) yang menerangkan bahwa dari beberapa studi yang mengkaji faktor-faktor pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i-Martin (1997); Knight, Loayza, dan Villanueva (1993); Mankiw, Romer, dan Weil (1992), serta Levine dan Renelt (1992), menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan Level Awal Pertumbuhan (Level Awal GDP).

Dengan demikian secara sistematis analisis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4. Kerangka Analisis

Variabel Investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua sisi, yaitu: dari sisi permintaan, investasi akan menciptakan atau menghasilkan pendapatan (*return on investment*), sedangkan dari sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal. Demikian halnya dengan variabel Akumulasi Modal Manusia, dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar berarti akan

meningkatkan tenaga kerja produktif. Sedangkan dari sisi permintaan, penambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sedangkan desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dalam alokasi sumber daya publik. Hal ini menurut *Tiebout* karena pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan efisiensi dalam perekonomian, yang selanjutnya efisiensi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu ukuran desentralisasi fiskal menurut Zang dan Zou (1998), yang sering digunakan dalam studi untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya belanja pemerintah daerah dibanding dengan pemerintah pusat, dimana tingkat desentralisasi yang semakin besar ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio belanja pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah pusat. Peningkatan rasio belanja pemerintah daerah tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena secara implisit peningkatan jumlah belanja pemerintah daerah mencerminkan peningkatan investasi publik di masyarakat, dimana investasi publik akan memiliki dampak produktivitas langsung terhadap perekonomian sebagaimana investasi swasta.

Berkaitan dengan uraian di atas dan mengacu pada tujuan penelitian, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Desentralisasi fiskal berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, dimana era baru desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan dengan desain pendelegasian fiskal pada periode sebelumnya.
2. Variabel Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi.

3. Variabel Akumulasi Modal Manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi.
4. Variabel Level Awal PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara rinci dibagi dalam enam bab utama, dan secara berurutan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka analisis dan hipotesis, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 : Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan tentang konsep desentralisasi fiskal, teori pertumbuhan ekonomi, dan studi empiris atau penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah.
- Bab 3 : Metode Penelitian, yang akan menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan spesifikasi model penelitian, dan metode analisis dan pengolahan data.
- Bab 4 : Gambaran Umum Provinsi Jambi, yang menguraikan gambaran umum mengenai kondisi geografis, sosial, perekonomian, dan keuangan daerah terkait dengan implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi.
- Bab 5 : Hasil Analisis dan Pembahasan, yang menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasannya berdasarkan hasil estimasi model ekonometrika yang digunakan sebagai alat analisis pada penelitian ini.
- Bab 6 : Kesimpulan dan Saran, yang menguraikan simpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Sedangkan secara lebih rinci, Kuznets dalam Jhingan (2008) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya, dimana kenaikan kapasitas/kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen, yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; (2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, dan; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Dari definisi tersebut di atas, tersirat bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi mengalami peningkatan atau kenaikan dalam jangka panjang. Menurut Mankiw (2007), untuk mengukur kinerja ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran yang sering digunakan, dimana PDB meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Analisis terhadap komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi telah sejak lama dilakukan para ahli ekonomi, melalui sejumlah pengamatan dan penelitian terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Hasil analisis tersebut memunculkan sejumlah pendapat dan model atau teori tentang pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai studi empiris dan teori-teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi terkait dengan

pertumbuhan ekonomi, sejumlah faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain adalah: jumlah penduduk (tenaga kerja), kualitas sumber daya manusia, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi), inovasi, dan kekayaan sumber daya alam.

Menurut Woller dan Phillips (1998), dari beberapa studi yang mengkaji faktor-faktor pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i-Martin (1997); Knight et al. (1993); Mankiw et al. (1992), serta Levine dan Renelt (1992), menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan Level Awal Pertumbuhan Ekonomi (Level Awal GDP).

2.1.1. Investasi

Teori pertumbuhan ekonomi yang menempatkan investasi sebagai faktor penting pertumbuhan ekonomi antara lain adalah Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Model Pertumbuhan Solow. Menurut Harrod-Dommar setiap perekonomian pada dasarnya harus menyisihkan atau menabung suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau mengganti barang-barang modal yang mengalami penyusutan atau rusak, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (*capital stock*).

Dalam persamaan yang sederhana, teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dinyatakan dalam bentuk: $\Delta Y/Y = s/k$, dimana s adalah rasio tabungan nasional dan k adalah rasio modal-output nasional. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal-output nasional. Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan tersebut di atas sangatlah sederhana, yaitu: agar bisa tumbuh dengan cepat, setiap perekonomian harus menabung atau melakukan investasi sebanyak mungkin dari pendapatan nasionalnya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat (Todaro dan Smith, 2006).

Demikian halnya dengan Model Pertumbuhan Solow sebagaimana dijelaskan Mankiw (2007) bahwa pada setiap momen, persediaan modal merupakan determinan *output* perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan tersebut bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi, dan dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal tersebut adalah investasi dan depresiasi. Dalam hal ini investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dimana hal tersebut menyebabkan kenaikan persediaan modal. Sedangkan depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dimana hal tersebut menyebabkan persediaan modal berkurang.

Beberapa ahli lainnya juga mengemukakan tentang pentingnya investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2008) investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua sisi, yaitu: dari sisi permintaan, investasi akan menciptakan atau menghasilkan pendapatan (*return on investment*), sedangkan dari sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal.

Lebih lanjut Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa akumulasi modal (*capital accumulation*) diperoleh jika sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan *output* dan pendapatan di masa depan. Dalam hal ini investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi produktif secara langsung (melalui pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku baru), investasi dalam bentuk infrastruktur sosial dan ekonomi, dan juga investasi dalam sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja.

Sedangkan *Chenery dan Carter* dalam Sodik (2005) mengemukakan pemikiran tentang pentingnya investasi khususnya dalam bentuk penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu bahwa dana eksternal (Penanaman Modal Asing) sebagai sumber investasi dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa studi empiris lainnya seperti Alfaro (2003) dan Sodik (2005) juga menunjukkan bahwa secara umum investasi memberikan dampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Alfaro (2003) yang dilakukan dengan menggunakan regresi data panel lintas negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan lainnya dalam periode 1981-1999 memperlihatkan bahwa investasi modal asing khususnya pada sektor manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan studi Sodik (2005) yang dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dari 26 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 1998-2003, menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil studi tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan Solow dan juga pendapat Todaro dan Smith (2003) yang menegaskan bahwa investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dari peningkatan investasi akan memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan kesempatan kerja dan menaikkan pendapatan nasional sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Akumulasi Modal Manusia

Terkait dengan faktor akumulasi modal manusia, beberapa teori pertumbuhan dan studi menegaskan adanya hubungan atau pengaruh antara sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan Dale Jorgenson et al. (1987) terhadap ekonomi Amerika Serikat dalam periode 1948-1979 menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi, dimana 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, modal manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan input penting dalam fungsi produksi agregat.

Dilihat dari segi kuantitas sumber daya manusia, menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar berarti akan

meningkatkan tenaga kerja produktif. Sedangkan dari sisi permintaan, penambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan pertumbuhan penduduk, Levine dan Renelt dalam Woller dan Phillips (1998) juga mengemukakan bahwa variabel pertumbuhan penduduk merupakan variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan penganut aliran teori pertumbuhan ekonomi klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan John Stuart Mill. Menurut penganut teori pertumbuhan klasik tersebut, pada awalnya penambahan penduduk akan meningkatkan pendapatan per kapita, namun jika jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan maka akan berlaku hukum *Law of Diminishing Returns*, yaitu penambahan penduduk tersebut akan mempengaruhi fungsi produksi dimana produksi marjinal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada kondisi dimana pendapatan per kapita sama dengan produksi marjinal. Pada kondisi tersebut pendapatan per kapita mencapai kondisi yang maksimum. Jumlah penduduk dimana pendapatan per kapita mencapai kondisi maksimum tersebut disebut dengan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik maksimum tersebut, maka pertumbuhan penduduk justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari Model Pertumbuhan Solow. Dengan mengacu pada Model Pertumbuhan Solow, suatu perekonomian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menyulitkan perekonomian untuk mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila pekerja tumbuh dengan cepat.

Pendapat lain terkait dengan pertumbuhan penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi juga dikemukakan oleh Becker dan Murphy dalam Wibowo (2008) yang berpendapat bahwa masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak memiliki kecenderungan untuk meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia sedangkan wilayah yang jarang penduduknya

memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak untuk mengisi pasar tenaga kerja, namun peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam, sehingga hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam.

Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, beberapa studi tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja atau pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif. Studi yang dilakukan oleh Lim (1996) terhadap perekonomian di Jepang dan Korea Selatan, menengarai bahwa tingginya tingkat pertumbuhan pada dua negara maju Asia tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat dari tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi.

Demikian halnya dengan studi yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan modal manusia sebagai variabel kontrol untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dengan menggunakan regresi data panel dari lima puluh negara bagian di Amerika Serikat dalam periode waktu 1992-1996, memperlihatkan bahwa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika.

Sementara itu, secara lebih tegas Schweke (2004) juga memberikan afirmasi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlihat dari peningkatan kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang pertumbuhan ekonomi regional yang menggunakan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel penjelas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil studi Garcia dan Soelistianingsih (1998), yang mengestimasi pengaruh variabel modal manusia (yang salah satunya diukur dengan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan

menengah) memberikan konfirmasi bahwa modal manusia mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya studi Brata (2002) yang meneliti hubungan antara pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional Indonesia, memberikan bukti adanya hubungan dua arah antara pembangunan manusia (yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia) dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, dimana pembangunan manusia yang berkualitas berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan demikian pula sebaliknya.

2.1.3. Level Awal GDP

Berkaitan dengan Level Awal Pertumbuhan Ekonomi atau Level Awal GDP, beberapa studi yang menggunakan level awal pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil studi Woller dan Phillips (1998), dan Thiessen (2003), menyimpulkan bahwa semakin tinggi Level Awal Pertumbuhan Ekonomi (*Initial Per Capita Regional GDP*) maka akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya. Demikian halnya dengan Barry dan Jules (2008) yang berpendapat bahwa variabel level awal pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah, dimana konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan Level Awal Pertumbuhan Ekonomi/Level Awal GDP, artinya semakin tinggi Level Awal Pertumbuhan Ekonomi (*initial per capita regional GDP*) maka pertumbuhan ekonomi dalam tahun berikutnya akan semakin rendahnya.

Berbeda dengan hasil kedua penelitian di atas, hasil studi Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan level awal pertumbuhan GDP riil per kapita sebagai salah satu variabel kontrol yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil per kapita pada periode sebelumnya merupakan determinan penting dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi periode berjalan.

2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban belanja. Menurut Teresa Ter-minassian (1997) pelaksanaan desentralisasi fiskal dan reformasi daerah telah menjadi kecenderungan global selama dekade 1990-an, hal ini ditunjukkan dari semakin berkembangnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, baik di negara-negara federal maupun di negara-negara kesatuan, termasuk di negara yang memiliki tradisi otokratik-sentralistik. Hal tersebut didasari oleh ekspektasi terwujudnya pemerintah yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, dan adanya keyakinan yang kuat dari negara-negara tersebut untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut merujuk pada Laporan Bank Dunia 2010, dengan mengambil contoh India dan China, yang menggarisbawahi bahwa desentralisasi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Lobao dan Kraybill dalam Yamoah (2007) terdapat tiga pandangan atau perspektif utama mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, yaitu: *Pro-Decentralization*, *Anti-Decentralization*, dan *Intermediate Decentralization*.

Perspektif *Pro-Decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat, dan manfaat atau efisiensi yang terjadi ketika pemerintahan terdesentralisasi. Tanzi (1996) mengemukakan bahwa justifikasi dari manfaat desentralisasi adalah karena alasan alokasi dan efisiensi, dimana dengan desentralisasi fiskal pemerintah lokal akan cenderung menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai dengan preferensi masyarakat atau penduduk lokal mengingat bahwa pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya sehingga lebih efisien dan diharapkan akan mendorong peningkatan ekonomi.

Dukungan terhadap desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari penjelasan Litvack et al. (1998) sebagaimana dikutip Sidik (2002) yang mengemukakan

bahwa beberapa ahli seperti Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995) memberikan argumen yang mendukung desentralisasi yaitu bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah lokal yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Menurut Tiebout (1956) jika penyediaan barang dan jasa publik diselenggarakan oleh pemerintah secara tersentralisasi, akan mengakibatkan rendahnya kompetisi yang dihadapi oleh pemerintah pusat ketika pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, disamping proses pengambilan keputusan sendiri harus melewati sistem birokrasi yang panjang sehingga keputusan yang dihasilkan tidak efisien sama sekali.

Oleh sebab itu, Tiebout menyarankan agar penyediaan barang dan jasa publik dilakukan oleh pemerintah lokal yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan karakter masyarakat di daerahnya, disamping itu proses pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang panjang, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien dan efektif.

Lebih jauh Tiebout menjelaskan bahwa pada saat barang dan jasa publik disediakan di tingkat lokal, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi antar pemerintah daerah karena individu pada suatu daerah akan memilih dan menilai kualitas dari pelayanan atau penyediaan barang dan jasa publik oleh suatu pemerintah daerah dibandingkan dengan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang telah dibayarkan, dimana individu dalam masyarakat akan memilih untuk menetap di daerah yang anggaran pemerintah daerahnya memenuhi preferensi maksimum antara pelayanan publik dengan pajak yang

harus mereka bayarkan. Ketika masyarakat merasa tidak ada kesesuaian antara kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik yang bersifat lokal tersebut, maka individu dalam masyarakat akan meninggalkan daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya sehingga akan mendorong efisiensi ekonomi.

Oleh karenanya, dengan adanya pelimpahan wewenang yang diikuti dengan pendanaan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani penyediaan kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien, sehingga akan meningkatkan *output* perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pandangan *pro-decentralization* juga dikemukakan oleh Thiessen (2003) yang secara rinci mengidentifikasi empat argumentasi terkait dengan manfaat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: *pertama*, bahwa penyediaan barang dan jasa publik secara seragam untuk setiap daerah secara umum adalah tidak efisien, hal ini dikarenakan *marginal benefit* dari pelayanan publik di masing-masing daerah berbeda disamping ketidaksamaan skedul permintaan terhadap barang dan jasa publik lokal di masing-masing daerah. Dengan desentralisasi, sumber daya dapat disimpan dan dimanfaatkan pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing daerah sehingga akan memicu efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan *output* perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan pengeluaran pemerintah yang merespon perbedaan preferensi lokal cenderung lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian daripada kebijakan pemerintah pusat yang cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga para pembayar pajak akan memperoleh kepuasan atau kesejahteraan yang lebih baik.

Kedua, bahwa desentralisasi akan memunculkan kompetisi secara vertikal dan horizontal di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, dimana hal tersebut akan mencegah terjadinya perilaku pemerintah yang cenderung untuk memaksimalkan tingkat pendapatan yang berpotensi merugikan para pembayar pajak. Dengan demikian, pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada persaingan selain memaksimalkan pendapatan seperti mempertahankan atau menurunkan tarif pajak,

memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan bagi kegiatan bisnis, serta melakukan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, dengan tetap menjaga tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu, masing-masing tingkatan pemerintah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai pengeluaran sektor publik yang sesuai dengan preferensi masyarakat atau para pembayar pajak. Hal tersebut akan mencegah terjadinya *over supply* barang dan jasa publik dan inefisiensi pelayanan sektor publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Ketiga, bahwa desentralisasi fiskal yang secara eksplisit menunjukkan pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi pemerintah lokal untuk secara aktif mencari inovasi dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa publik. Persaingan antar daerah dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa publik tersebut memacu pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dengan biaya yang minimum dan kualitas yang lebih baik, dan mendorong terjadi efisiensi produksi sehingga akan mendorong peningkatan *output* perekonomian. Disamping itu, desentralisasi fiskal akan meringankan tugas pemerintah pusat, sehingga pemerintah dapat fokus pada upaya efisiensi produksi barang dan jasa publik yang masih menjadi tanggung jawabnya, yaitu barang dan jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Keempat, terdapat beberapa argumentasi politik bahwa desentralisasi akan mengurangi konsentrasi kekuatan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*vested interests*) dalam kebijakan publik, dan mendorong demokrasi lokal. Argumentasi senada juga dikemukakan oleh BC Smith (1985) dalam Haris (2002), yang mengemukakan bahwa desentralisasi memberikan keuntungan karena beberapa alasan, antara lain yaitu: (1) desentralisasi akan menciptakan partisipasi yang luas dalam politik melalui demokrasi lokal sehingga stabilitas politik dapat terjaga; (2) desentralisasi akan menciptakan kesetaraan politik (*political equality*) dari partisipasi politik yang lebih besar sehingga akan mengurangi konsentrasi kekuasaan pada lembaga tertentu, dan kekuasaan politik yang lebih tersebar akan memberikan manfaat bagi

seluruh lapisan masyarakat; (3) Akuntabilitas pemerintah lokal akan meningkat karena masyarakat lokal telah terintegrasikan dalam sistem desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik, dan akses lokal yang lebih besar; dan (4) kepekaan pemerintah akan meningkat karena perwakilan rakyat lokal yang mengetahui lebih banyak kebutuhan dan situasi lokal serta bagaimana cara mengelolanya secara efektif dan efisien. Dengan kondisi dimana stabilitas politik terjaga, akuntabilitas pemerintah lokal meningkat, dan kepekaan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik lebih efektif dan efisien, maka diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan *pro-decentralization*, perspektif *anti-decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dan kelemahan menempatkan tanggungjawab utama di pundak pemerintah daerah. Hipotesis yang dibangun dalam perspektif ini adalah desentralisasi fiskal akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan keterbatasan dari pemerintah lokal dan adanya peningkatan tekanan fiskal karena tambahan tanggungjawab.

Mengutip pendapat Oates, Yamoah (2007) mengemukakan bahwa kelemahan dari desentralisasi adalah kerugian dalam skala ekonomi, dimana dengan sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit *output* layanan karena mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun kompetisi antara pemerintah daerah disebut-sebut sebagai keuntungan desentralisasi fiskal, bisa juga memiliki efek negatif dalam hal persaingan antara pemerintah daerah tersebut mengarah pada penyediaan layanan publik yang tidak efisien sehingga desentralisasi mungkin menjadi tidak diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perspektif *anti-decentralization* juga dikemukakan Prud'homme (1995), yang mengingatkan beberapa bahaya desentralisasi, antara lain yaitu bahwa desentralisasi akan membuat kebijakan redistribusi menjadi lebih sulit, demikian halnya dengan program stabilisasi makroekonomi menjadi lebih sulit untuk

dilaksanakan karena kebijakan pemerintah daerah dapat bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pandangan lain yang memperingatkan kelemahan pelaksanaan desentralisasi fiskal juga di kemukakan oleh Thiessen (2003), yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan peningkatan ketidakadilan atau disparitas regional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penyediaan infrastruktur dan barang/jasa publik lainnya sebagai akibat dari tingkat pendapatan dan basis pajak yang berbeda-beda antara wilayah dan daerah, dimana daerah kaya memiliki kecenderungan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu masyarakat daerah kaya memiliki kecenderungan untuk menolak masuknya masyarakat berpendapatan rendah.
2. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, karena pemerintah pusat memiliki dan dapat menarik lebih banyak personel dengan kualitas yang lebih baik melalui pemberian gaji dan peluang karier yang lebih baik (Prud'homme, 1994). Sedangkan dengan desentralisasi, Pemerintah daerah cenderung memiliki kualitas personel yang terbatas karena menawarkan lebih sedikit kesempatan untuk kemajuan karir dan mungkin gaji lebih rendah, hal tersebut mengakibatkan desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan pemerintah dengan kualitas rendah, dan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interest*), sehingga mengakibatkan penyediaan pelayanan publik menjadi tidak efisien.
3. Implementasi desentralisasi fiskal di negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung tidak menguntungkan. Mengutip Prud'homme (1995), dan Bahl dan Linn (1992), Thiessen lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan desentralisasi fiskal diperlukan biaya tetap yang tidak sedikit sehingga akan menyerap sebagian besar kapasitas anggaran yang jumlahnya sangat terbatas.

4. Desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait dengan kebijakan stabilisasi yang akan lebih sulit untuk dilakukan.

Sedangkan perspektif *intermediate-decentralization* menekankan pada pentingnya lokasi dan hubungan kelembagaan. Menurut perspektif ini sebagaimana argumentasi Lobao dan Kraybill (2006) bahwa perlu untuk memperhitungkan variasi antar daerah ketika mempelajari peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan redistribusi. Pengaruh dari pergeseran dalam kewenangan pemerintah dan dinamika internal yang berbeda antar daerah, menjadikan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab tambahan dari desentralisasi akan bervariasi sehingga mengakibatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antara daerah.

Terlepas dari ketiga perspektif/pandangan tentang desentralisasi tersebut, pendapat dan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini ditunjukkan dari implemementasi desentralisasi fiskal yang semakin berkembang di berbagai negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat keyakinan yang kuat dari negara-negara tersebut untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.3 Studi Empiris tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Upaya untuk melihat hubungan atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti di sejumlah negara melalui berbagai penelitian dan kajian empiris. Dimana dalam studi tersebut, para peneliti pada umumnya menggunakan lebih dari satu ukuran desentralisasi fiskal, karena cukup sulit untuk mendapatkan indikator tunggal yang mencerminkan desentralisasi fiskal secara komprehensif mengingat pendelegasian fiskal dari pusat ke daerah dapat ditinjau dari berbagai perspektif

seperti dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan dari sisi otonomi/kemandirian daerah.

Menurut Akai dan Sakata (2002) bahwa guna menguji secara statistik kontribusi dana transfer antar pemerintah terhadap kinerja ekonomi, perlu untuk memformulasikan kriteria desentralisasi fiskal secara kuantitatif. Pada umumnya, pendelegasian fiskal tersebut sering dipandang sebagai penyerahan otoritas terkait dengan keputusan dalam pembangunan daerah. Semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi.

Menurut Halder (2007), dua ukuran desentralisasi fiskal yang sering digunakan sebagai indikator desentralisasi fiskal adalah Rasio Pendapatan (*Revenue Ratio*) dan Rasio Pengeluaran (*Expenditure Ratio*). Selain dua indikator tersebut Akai dan Sakata (2002) juga menggunakan Indikator Otonomi (*Autonomy Indicator*) yang terdiri atas berbagai ukuran kemandirian fiskal. Salah satu alasan yang mendasari penggunaan indikator otonomi adalah suatu daerah mungkin memperoleh dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila pemerintah daerahnya mampu mendanai pengeluaran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya, dalam hal ini indikator desentralisasi fiskal terdiri dari dua ukuran, yaitu : (1) Rasio total PAD kabupaten/kota di suatu provinsi terhadap total pendapatan dengan memperhitungkan dana transfer atau dana perimbangan; (2) total PAD kabupaten/kota di suatu provinsi terhadap total pendapatan tanpa memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan.

Masih terkait dengan Indikator Otonomi, Wibowo (2008) mengajukan dua indikator baru untuk mengukur tingkat otonomi yaitu: (1) Rasio PAD terhadap total pengeluaran, yang menyajikan tingkat independensi suatu daerah dalam membiayai pengeluaran APBD, dimana semakin besar rasio tersebut semakin besar pula tingkat otonomi di daerah tersebut dan rasio PAD terhadap dana perimbangan; dan (2) Rasio PAD terhadap dana perimbangan, yang mengukur kapasitas daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, dimana semakin besar PAD yang diterima pemerintah

daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang sehingga derajat desentralisasi fiskal semakin baik.

Hasil berbagai penelitian dan kajian empiris, dengan menggunakan berbagai indikator desentralisasi fiskal sebagaimana dijelaskan di atas ternyata memberikan simpulan yang menarik, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: (1) desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (3) desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditemui dari hasil studi yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Akai dan Sakata (2002), Thiessen (2003), dan Desai et al. (2003). Untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Akai dan Sakata (2002) menggunakan model ekonometrika dan regresi data panel dengan data dari lima puluh negara bagian Amerika dalam periode 1992-1996, dimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan GDP per kapita, sedangkan variabel desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan *revenue indicator*, *production indicator*, *autonomy indicator*, dan *production-revenue indikator*, dimana variabel desentralisasi fiskal tersebut dimasukkan satu per satu dalam regresi model ekonometrika untuk melengkapi variabel kontrol. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Amerika Serikat memiliki kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja ekonomi negara bagian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thiessen (2003) dengan menggunakan model ekonometrika dan analisis data panel dari negara-negara OECD berpendapatan tinggi dalam periode 1973-1998, menunjukkan bahwa pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel desentralisasi fiskal yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan pemerintah daerah terhadap total pendapatan pemerintah, dan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah adalah mengikuti pola *bell shaped*, dimana desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

ketika derajat desentralisasi masih rendah, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang tinggi maka desentralisasi fiskal justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Demikian halnya dengan studi yang dilakukan Desai et al. (2003) yang mencoba meneliti pengaruh otonomi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Rusia dengan menggunakan model ekonometri dan analisis data panel dari 80 wilayah di Rusia dalam periode tahun 1996-1999, menunjukkan bahwa otonomi fiskal di Rusia yang dalam hal ini di-proxy dengan *tax retention* memberikan dampak positif terhadap pemulihan *output* nasional.

Sedangkan studi lainnya yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998), Zhang dan Zou (1998), dan Xie, et al. (1999) sampai pada simpulan bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Davoodi dan Zou (1998) dalam penelitiannya atas 46 negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan analisis data panel selama periode 1970-1989, menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dan tingkat kemajuan ekonomi di negara-negara industri, dan semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka kinerja ekonomi di negara-negara berkembang akan semakin tereduksi.

Sementara Xie, et al. (1999) dalam penelitiannya pada negara bagian di Amerika Serikat dengan menggunakan data *time series* selama periode 1948-1994 juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dalam hal ini diukur dengan menggunakan total pengeluaran masing-masing negara bagian terhadap total pengeluaran pemerintah, kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Simpulan yang sama, yang menunjukkan dampak negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga diperoleh dari hasil penelitian Zhang dan Zou (1998). Dalam penelitiannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional dari 28 provinsi di China dalam kurun waktu tahun 1980-1992, diperoleh simpulan bahwa tingginya tingkat desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran pemerintah akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu studi empiris lainnya tidak menemukan bukti adanya kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana

ditunjukkan oleh hasil penelitian Woller dan Phillips (1998), dan Baskaran dan Feld (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Woller dan Phillips (1998) dengan menggunakan model ekonometrika dan analisis data panel dari 23 negara-negara berkembang (menurut kategori IMF) dalam periode 1974-1991, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, dimana dalam penelitian ini variabel desentralisasi diukur dengan menggunakan rasio pendapatan pemerintah daerah (dengan dan tanpa memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari bantuan dan *grant*) terhadap total pendapatan pemerintah, dan rasio pengeluaran pemerintah daerah (dengan dan tanpa memperhitungkan pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan dan pengeluaran untuk jaminan sosial) terhadap total pengeluaran pemerintah.

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskaran dan Feld (2009) untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 23 OECD dalam periode 1975-2001, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dalam penelitian ini variabel desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio pendapatan pemerintah daerah dari pajak terhadap total pendapatan pemerintah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menggunakan model analisis ekonometrika, juga menghasilkan simpulan yang berbeda. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil penelitian Wibowo (2008), dan Waluyo (2007). Sementara hasil penelitian lainnya berkesimpulan sebaliknya, sebagaimana hasil penelitian Swasono (2007).

Hasil studi Wibowo (2008) untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan model ekonometrika dan regresi data panel tingkat provinsi yaitu 29 provinsi di Indonesia yang mencakup periode sebelum dan setelah era desentralisasi fiskal yaitu tahun 1999-2004, dimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju

pertumbuhan PDRB per kapita, sedangkan variabel desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan Indikator Pendapatan, Indikator Pengeluaran, dan Indikator Otonomi menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah, dimana era baru desentralisasi fiskal yang implementasinya dilakukan sejak tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskal sebelumnya.

Bukti empiris tentang pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga ditunjukkan dari hasil penelitian Waluyo (2007). Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah dengan menggunakan model ekonometrika persamaan simultan dan menggunakan data panel antar propinsi yang meliputi 33 propinsi dalam periode waktu tahun 2001-2005, diperoleh simpulan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana mekanisme pemberian Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Disamping itu juga disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan penelitian yang menunjukkan dampak negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditunjukkan oleh hasil penelitian Swasono (2007). Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data tingkat kabupaten sebanyak 367 kabupaten/kota dan mencakup periode waktu sepuluh tahun sebelum era desentralisasi (1991-2000) dan 5 tahun setelah era desentralisasi fiskal (2001-2005), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dalam hal ini diukur dengan dua ukuran yaitu rasio pendapatan daerah dan rasio pengeluaran, cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara lebih rinci simpulan, variabel, dan metode yang digunakan dalam beberapa penelitian dan kajian empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut terangkum pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Daftar Studi Empiris Tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian	Data	Metode	Variabel Dependen	Variabel Kontrol	Ukuran Desentralisasi Fiskal	Simpulan Hasil Penelitian
Akai dan Sakata (2002)	Data panel 50 negara bagian di USA, periode 1992-1996	Model regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i>	Rata-rata tingkat pertumbuhan <i>Gross State Product (GSP)</i> per kapita, periode 1992-1996.	<ul style="list-style-type: none"> • Level awal pertumbuhan <i>GSP</i> • Rasio lulusan SMA terhadap penduduk usia 18-24 • Pertumbuhan penduduk • Porsi kursi Demokrat dilegislatif • Koefisien GINI • Paten • Keterbukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengeluaran: Rasio pengeluaran pemerintah daerah (<i>local</i>) terhadap pengeluaran pemerintah (<i>local</i> dan <i>state</i>) • Indikator pendapatan: Rasio pendapatan pemerintah daerah (<i>local</i>) terhadap pendapatan pemerintah (<i>local</i> dan <i>state</i>) • Indikator Otonomi, terdiri dari 2 indikator: Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (tidak termasuk <i>federal grants</i>), dan Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (termasuk <i>federal grants</i>) 	Secara umum desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana Indikator pengeluaran dan indikator pendapatan menunjukkan tanda positif dan signifikan, sedangkan indikator otonomi menunjukkan tanda positif tetapi tidak signifikan.
Wibowo (2008)	Data panel 29 provinsi di Indonesia, periode 1999-2004	Model regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i>	Tingkat pertumbuhan PDRB provinsi (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Level awal pertumbuhan PDRB • Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP dan SMU. • Pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengeluaran terdiri dari 2 indikator: Rasio total pengeluaran pemerintah kabupaten/ kota dalam satu provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi, dan Rasio total pengeluaran pemerintah 	Secara umum implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana Indikator pengeluaran dan indikator pendapatan

(Sambungan Tabel 2.1)

Penelitian	Data	Metode	Variabel Dependen	Variabel Kontrol	Ukuran Desentralisasi Fiskal	Simpulan Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Porsi nilai Investasi domestik dalam PDRB • Porsi nilai ekspor dalam PDRB 	<p>provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator pendapatan terdiri dari 2 indikator: Rasio total pendapatan pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi terhadap total pendapatan pemerintah pusat, Rasio total pendapatan pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi (tidak termasuk dana perimbangan) terhadap total pendapatan pemerintah pusat. • Indikator Otonomi, terdiri dari 4 indikator: Rasio PAD kabupaten/ kota dalam satu provinsi terhadap total pendapatan (tidak termasuk dana perimbangan), Rasio PAD kabupaten/ kota dalam satu provinsi terhadap total pendapatan (termasuk dana perimbangan), Rasio PAD terhadap pengeluaran dan Rasio PAD terhadap Dana Perimbangan 	<p>menunjukkan tanda positif dan signifikan, sedangkan indikator otonomi berpengaruh negatif namun cenderung membaik setelah era desentralisasi fiskal tahun 2001.</p>

(Sambungan Tabel 2.1)

Penelitian	Data	Metode	Variabel Dependen	Variabel Kontrol	Ukuran Desentralisasi Fiskal	Simpulan Hasil Penelitian
Thiessen (2003)	Data panel 26 negara OECD berpendapatan tinggi, periode 1973-1998	Model regresi data panel dengan metode OLS.	GDP per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Initial level of GDP</i> • Rasio Investasi terhadap GDP • <i>Human Capital</i> • Pertumbuhan penduduk • Depresiasi • Keterbukaan (Openness) • Inflasi • Total pengeluaran pemerintah • Total penerimaan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengeluaran: Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah • Indikator pendapatan: Porsi pajak yang diberikan kepada daerah terhadap total pendapatan pajak, dan Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi ketika derajat desentralisasi masih rendah, dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika tingkat desentralisasi fiskal tinggi
Zhang dan Zhou (1998)	Data panel 28 provinsi di China, periode 1980-1992	Model regresi data panel dengan metode OLS.	Pertumbuhan GDP riil provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pertumbuhan angkatan kerja • Rasio investasi terhadap GDP • Keterbukaan ekonomi • Tingkat inflasi • <i>Tax rates</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengeluaran: Rasio pengeluaran pemerintah provinsi terhadap pengeluaran pemerintah pusat yang dinyatakan dalam per kapita. 	Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Xie et al.(1999)	Data <i>time series</i> ekonomi Amerika, periode 1948-1994	Model regresi data <i>time series</i> dengan metode OLS.	Tingkat pertumbuhan GDP per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pertumbuhan angkatan kerja • Investasi modal fisik • Keterbukaan ekonomi • Tingkat inflasi • Indeks Harga energi • Koefisien GINI 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio belanja pemerintah daerah (<i>local and state</i>) terhadap total belanja pemerintah (tidak termasuk hibah) • Tingkat rata-rata pajak, diproksi dengan rasio total penerimaan pemerintah terhadap PDB 	Desentralisasi dalam belanja publik kurang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi.

(Sambungan Tabel 2.1)

Penelitian	Data	Metode	Variabel Dependen	Variabel Kontrol	Ukuran Desentralisasi Fiskal	Simpulan Hasil Penelitian
Davoodi dan Zou (1998)	Data panel 46 negara maju dan Negara berkembang, periode 1970-1989	Model regresi data panel dengan metode OLS.	Tingkat pertumbuhan GDP riil per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pertumbuhan penduduk • <i>Initial Human capital</i>, diproxi dengan <i>enrollment school</i> tingkat SMP • Initial GDP per kapita • Rasio investasi terhadap GDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio pengeluaran pemerintah lokal terhadap total pengeluaran pemerintah 	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, sedangkan di negara maju tidak ditemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.
Woller dan Phillips (1998)	Data panel 23 Negara <i>less developed country</i> (LDC) Periode 1974-1991	Model regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i>	Tingkat pertumbuhan GDP riil per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The Initial Level of GDP</i> • Rasio Investasi terhadap GDP • <i>Human capital</i>, diproxi dengan <i>enrollment school</i> tingkat SMP • Tingkat Pertumbuhan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio pendapatan pemerintah daerah terhadap total pendapatan pemerintah • Rasio pendapatan pemerintah daerah (dikurangi bantuan dan hibah) terhadap total pendapatan pemerintah • Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah • Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (dikurangi belanja pertahanan dan belanja sosial) 	Hasil studi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hampir semua indikator desentralisasi fiskal menunjukkan hubungan tidak signifikan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif, sekaligus eksplanatory-kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif dilakukan untuk memberikan penjelasan berupa gambaran dan analisis terkait dengan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi berdasarkan fakta dan data kuantitatif. Sedangkan pendekatan eksplanatory kuantitatif dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain melalui proses pengujian hipotesis dengan menggunakan data kuantitatif, dalam konteks penelitian ini adalah menjelaskan hubungan antara variabel Desentralisasi Fiskal dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi.

3.2. Variabel dan Spesifikasi Model Penelitian

3.2.1. Variable Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu variabel tidak bebas atau *dependent variable* dan variabel penjelas atau *explanatory variables*. Variabel tidak bebas atau *dependent variable* dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang direfleksikan dengan pertumbuhan PDRB riil perkapita (*growth rate of per capita Regional GDP*) kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang diukur dengan menggunakan satuan persen (%).

Sedangkan variabel penjelas (*explanatory variables*) yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

- (1) Variabel yang secara empirik menjadi determinan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini disebut sebagai variabel pengendali (*control variables*).

Beberapa variabel yang telah diakui secara luas sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Investasi**, yang dalam penelitian ini diproxy dengan total penjumlahan dari nilai realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Moaal Asing (PMA) pada kabupaten atau kota di

wilayah Provinsi Jambi yang diukur dengan menggunakan satuan jutaan rupiah.

- **Akumulasi Modal Manusia**, yang dalam penelitian ini di $proxy$ dengan menggunakan jumlah penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan (memiliki ijazah terakhir) Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) yang diukur dengan satuan orang. Selain itu Akumulasi Modal Manusia juga $proxy$ dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, yang diukur dalam satuan persen.
- **PDRB per Kapita Periode Sebelumnya**, yang dalam penelitian ini direfleksikan dengan PDRB riil per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun sebelumnya, yang diukur dengan menggunakan satuan jutaan rupiah.

(2) Variabel Desentralisasi Fiskal, yang merupakan variabel utama/*main explanatory variables* yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Variabel Desentralisasi Fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Indikator Desentralisasi Fiskal yang dikembangkan dalam penelitian Akai dan Sakata (2002), dan Wibowo (2008), yaitu:

- **Indikator Pengeluaran**

Indikator Pengeluaran (EI-1) merupakan rasio pengeluaran masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah pusat. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas dasar besarnya pengeluaran atau belanja.

- **Indikator Pendapatan**

Indikator Pendapatan terdiri dari pendapatan daerah kotor/*gross local revenue* (RI-1) dan pendapatan daerah netto/*net local revenue* (RI-2). Indikator Pendapatan RI-1 merupakan rasio dari total pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap total pendapatan pemerintah pusat. Sedangkan Indikator Pendapatan RI-2 merupakan rasio pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota (dengan tidak memperhitungkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang

bersifat *grants*) terhadap total pendapatan pemerintah pusat. Dengan demikian, Indikator Pendapatan RI-2, tidak memperhitungkan DAU dan DAK dalam total pendapatan daerah. Kedua Indikator Pendapatan tersebut dimasukkan untuk melihat seberapa besar kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan.

- **Indikator Otonomi**

Penggunaan Indikator Otonomi didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu daerah boleh jadi memperoleh dana perimbangan yang kecil, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut dapat dipandang cukup tinggi jika pemerintah daerah tersebut mampu mendanai belanjanya dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah tersebut.

Merujuk pada penelitian Akai dan Sakata (2002), sebagai Indikator Otonomi untuk mengukur level Desentralisasi Fiskal, digunakan rasio total PAD terhadap total pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota (AI-1). Selain itu dengan merujuk pada penelitian Wibowo (2008), sebagai Indikator Otonomi untuk mengukur level Desentralisasi Fiskal digunakan rasio total PAD terhadap total pengeluaran masing-masing pemerintah kabupaten/kota (AI-2), dan rasio PAD terhadap pendapatan dana perimbangan (AI-3). Indikator AI-2 mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintahnya, sedangkan Indikator AI-3 mengukur kapasitas daerah dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

3.2.2. Spesifikasi Model Penelitian

Spesifikasi model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi mengacu dari spesifikasi model ekonometrika yang digunakan dalam penelitiann Akai dan Sakata (2002), dan Wibowo (2008) yaitu sebagai berikut:

$$\text{EcoGrowth}_{it} = \alpha_0 + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\beta} + \alpha_1\text{DF}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Dimana, **EcoGrowth** adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita, **DF** adalah Indikator Desentralisasi Fiskal, **X** adalah variabel kontrol (yang dalam penelitian ini terdiri dari: **INVESTASI** = Jumlah nilai realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, **POPGROWTH** = Pertumbuhan penduduk, **HUMANCAP** = Penduduk Usia Kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke atas (SMA/SMK), dan **PDRB_AWAL** = PDRB per Kapita Periode Sebelumnya), β = parameter vektor, ε = *error term* (diasumsikan berdistribusi normal, homoskedastis, dan independen terhadap observasi), dan i = *individual cross section* kabupaten/kota.

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hasil estimasi model ekonometrika yang diharapkan untuk masing-masing variabel di atas adalah sebagai berikut:

- Variabel Investasi (**INVESTASI**) yang *diproxy* dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN diduga akan positif, karena secara empiris investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
- Variabel Akumulasi Modal Manusia yang *diproxy* dengan penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (**HUMANCAP**) diprediksi akan positif, karena daerah yang mampu mengelola sumberdaya angkatan kerjanya menjadi tenaga kerja produktif akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan Variabel Akumulasi Modal Manusia yang *diproxy* dengan pertumbuhan penduduk (**POPGROWTH**), juga diprediksi akan positif karena pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan juga meningkatkan ukuran pasar domestik sehingga meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Variabel PDRB per Kapita Periode Sebelumnya (**PDRB_AWAL**) yang direfleksikan dengan PDRB riil per kapita tahun sebelumnya, diprediksi berpengaruh positif.
- Selanjutnya, seluruh Variabel Desentralisasi Fiskal (**DF**) diprediksi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*, dan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang dikumpulkan mencakup periode waktu 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009. Dengan jumlah 6 kabupaten/kota pada periode sebelum desentralisasi dan 10 kabupaten/kota setelah periode desentralisasi fiskal, maka jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 observasi pada periode 1995-2000, dan 90 observasi pada periode 2001-2009.

Data yang digunakan dalam penelitian ini selain bersumber dari publikasi dari Biro Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan instansi terkait lainnya, juga diperoleh melalui akses internet pada alamat website/situs resmi antara lain yaitu: (1) <http://www.bps.go.id>; (2) <http://www.depkeu.go.id>; (3) <http://www.bi.go.id>.

3.4. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu memberikan penjelasan deskriptif tentang implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk mencapai tujuan kedua yaitu menganalisis pengaruh variabel desentralisasi fiskal terhadap variable pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) terhadap spesifikasi model ekonometrika yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mempermudah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan model analisis regresi berganda tersebut, akan digunakan perangkat lunak *eviews*.

3.4.1. Metode Estimasi

Dari spesifikasi model yang telah ditetapkan, maka untuk melihat hubungan atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi jambi, penulis menggunakan 3 regresi utama, yaitu:

- **Regresi atas Variabel Kontrol**

Untuk menegaskan kembali pengaruh kontrol variabel terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka penulis melakukan regresi atas variabel kontrol, dengan spesifikasi persamaan ekonometrika yaitu:

$$\ln(\text{PDRBPC})_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{INVESTASI})_{it} + \alpha_2 \ln(\text{HUMANCAP})_{it} + \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \ln(\text{PDRB_AWAL})_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

- **Regresi atas Variabel Kontrol dan Variabel *Dummy* Desentralisasi Fiskal**

Untuk menunjukkan efek penerapan kebijakan desentralisasi terhadap perubahan pola pertumbuhan ekonomi daerah *pasca* tahun 2001, maka penulis melakukan regresi variabel kontrol dengan variabel *dummy desentralisasi fiskal (post 2001)*, sehingga spesifikasi persamaan ekonometrikanya adalah:

$$\ln(\text{PDRBPC})_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{INVESTASI})_{it} + \alpha_2 \ln(\text{HUMANCAP})_{it} + \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \ln(\text{PDRB_AWAL})_{it} + \alpha_5 \text{dummyDF}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

- **Regresi Penuh Dengan Memasukkan *Interaction Term* antara Indikator Desentralisasi Fiskal Dengan Variabel *Dummy* Desentralisasi Fiskal**

untuk melihat atau menguji masing-masing indikator desentralisasi fiskal dan pengaruh perubahan era desentralisasi fiskal, maka penulis melakukan regresi penuh dengan memasukkan *interaction term* antara indikator desentralisasi fiskal dengan variabel *dummy (post 2001)*, sehingga spesifikasi persamaan ekonometrikanya adalah:

$$\begin{aligned} \ln(\text{PDRBPC})_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{INVESTASI})_{it} + \alpha_2 \ln(\text{HUMANCAP})_{it} + \\ & \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \ln(\text{PDRB_AWAL})_{it} + \alpha_5 \text{DF}_{it} + \\ & \alpha_6 \text{dummyDF} * \text{DF}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3.4)$$

Dalam regresi ini, masing-masing Indikator Desentralisasi Fiskal (6 indikator) dimasukkan satu per satu dalam model ekonometrik secara bergantian, untuk melengkapi variabel kontrol.

Mengingat data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel, maka setidaknya ada tiga metode estimasi regresi yang dapat digunakan untuk mengestimasi model persamaan ekonometrika yang telah dirumuskan, yaitu:

(1) Metode *Common Effect*;

Penggunaan metode ini secara sederhana adalah dengan menggabungkan semua data *cross section* dan *time series* tanpa melihat perbedaan baik antar series maupun antar unit *cross section*, sehingga diasumsikan intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu, dan *error term* menjelaskan perbedaan intersep dan koefisien slope sepanjang waktu dan individu tersebut, yang selanjutnya dilakukan estimasi dengan metode regresi *Ordinary Least Squared* (OLS). Kelemahan penggunaan Metode *Common Effect* ini adalah ketidaksesuaian model dengan realita yang sebenarnya, dimana dalam kenyataannya karakteristik tiap individu atau unit *cross section* adalah berbeda.

(2) Metode *Fixed Effect*

Metode *Fixed Effect* merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan *dummy variable* untuk menangkap adanya perbedaan antar series dan antar unit *cross section* yang diakomodasikan melalui *intercept*, sehingga model estimasi ini sering disebut dengan metode *Least Square Dummy variables* (LSDV). Pengertian *Fixed Effect* didasarkan adanya perbedaan *intercept* antar unit *cross section* namun *intercept*nya sama antar waktu (*time invariant*). Model *Fixed Effect* juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar unit *cross section* dan antar waktu.

(3) Metode *Random Effect*.

Penggunaan *dummy variable* pada Metode *Fixed Effect* berkonsekuensi pada berkurangnya derajat bebas (*degree of freedom*) yang akan berdampak pada efisiensi dari parameter yang diestimasi. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan *dummy* untuk menggambarkan perbedaan antar series maupun antar *cross section* diganti dengan memasukan komponen perbedaan tersebut ke dalam *error*. Metode ini dikenal dengan *random effect* atau juga dikenal sebagai *Error Componen Model*. Dengan menggunakan Metode *Random Effect* ini,

maka penggunaan derajat bebas dapat dihemat sehingga akan berimplikasi pada hasil estimasi yang semakin efisien.

Untuk menentukan metode terbaik yang akan digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan menggunakan data panel, dilakukan dengan membandingkan hasil regresi ketiga metode tersebut melalui dua tahapan sebagai berikut:

(1) Menentukan antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect*

Penentuan metode *Common Effect* atau *Fixed Effect Model* yang akan dipilih untuk estimasi model dilakukan dengan uji F-Statistik yang merupakan uji atas *sum of square residual* masing-masing metode, dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{SSR_1 - SSR_2}{N-1}}{\frac{SSR_2}{NT - N - k}} = \frac{\frac{R_{fe}^2 - R_{ce}^2}{N-1}}{\frac{1 - R_{fe}^2}{NT - N - k}} \quad (3.5)$$

Dimana:

SSR_1 = adalah *Sum Square Residual* dari *Common Effect*

SSR_2 = adalah *Sum Square Residual Fixed Effect*

N = adalah banyaknya cross section

T = adalah banyaknya series

K = adalah banyaknya variable bebas

F- statistik mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak $N-1$ untuk numerator dan sebanyak $NT-N-k$ untuk denominator.

Hipotesis dari uji F ini adalah:

H_0 = Metode *Common Effect*

H_a = Metode *Fixed Effect*

Dari persamaan (3.2) jika diperoleh nilai F-hitung $>$ F-tabel pada tingkat keyakinan (α) tertentu maka hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *Fixed Effect* harus digunakan sebagai teknik estimasi dalam penelitian ini. Sebaliknya jika nilai F-hitung $<$ F-tabel pada tingkat keyakinan (α) tertentu

maka hipotesis H_0 diterima sehingga teknik estimasi yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Fixed Effect*.

(2) Menentukan antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*

Tahap selanjutnya adalah menentukan metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dipilih untuk estimasi model. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a) Pertimbangan Non Statistik

Beberapa pertimbangan non-statistik untuk menentukan model antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* antara lain dengan melihat unit *cross section* dan data yang digunakan dalam model, dimana menurut Green dan Turkey dalam Gelman (2005) jika jumlah sampel atau unit *cross section* hampir meliputi keseluruhan populasi maka model analisis data panel yang digunakan adalah Metode *Fixed Effect*. Jika digunakan pertimbangan tersebut, maka *Fixed Effect Model* merupakan metode yang disarankan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Pertimbangan non-statistik lainnya adalah dengan membandingkan periode waktu atau *time series* dari data dengan jumlah unit *cross section*. Jika data panel yang digunakan dalam penelitian mempunyai waktu penelitian (T) yang lebih besar dibanding dengan jumlah unit *cross section* (N) maka disarankan untuk menggunakan *Fixed Effect Model*, sedangkan *Random Effect Model* digunakan sebaliknya (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penelitian ini sebaiknya menggunakan *Fixed Effect Model* karena waktu penelitian (T=15) nilainya lebih besar dari unit *cross section* (N=10).

b) Uji Hausman

Untuk lebih memastikan pilihan metode estimasi terbaik maka perlu dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman yaitu *Hausman Test*.

Hipotesis dari *Hausman Test* adalah:

$$H_0 = \text{Metode } \textit{Random Effect}$$

$$H_a = \text{Metode } \textit{Fixed Effect}$$

Statistik Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak variabel bebasnya.

Jika dari hasil pengujian diperoleh *Chi Square* hitung $>$ *Chi Square* tabel, dan p-value signifikan, maka Hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *fixed effect* tepat atau lebih baik untuk mengestimasi data panel. Sebaliknya jika *Chi Square* hitung $<$ *Chi* tabel dan p-value tidak signifikan, maka hipotesis H_0 diterima sehingga akan lebih baik untuk menggunakan *random effect* dalam mengestimasi data panel.

3.4.2. Uji Spesifikasi Model

Setelah mengestimasi model dengan salah satu metode regresi data panel yang tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi/uji spesifikasi model. Langkah ini perlu untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun sudah tepat baik menurut kriteria teori ekonomi dan kriteria statistik

1) Kriteria Ekonomi

Evaluasi model berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan untuk melihat apakah model yang diestimasi telah sesuai dengan teori ekonomi, yang dilakukan dengan cara melihat tanda dan besaran koefisien parameter yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel penjelas.

2) Kriteria Statistik

Untuk mendapatkan model yang baik perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria statistik yang meliputi: uji signifikansi secara parsial (Uji-T), uji signifikansi secara menyeluruh (Uji-F) dan pengujian koefisien determinasi (*goodness of fit*).

a. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-T)

Uji signifikansi secara parsial atau uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas/variabel penjelas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

Hipotesa Uji -t adalah:

H_0 = koefisien regresi parameter tidak signifikan

H_a = koefisien regresi parameter signifikan

Untuk menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis tersebut, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai hasil uji (t-statistic) dari hasil regresi dengan t-tabel yang diperoleh dari Tabel Distribusi Normal Standar T , yaitu:.

- Jika T-statistic $>$ T-tabel maka H_0 ditolak yang berarti bahwa secara statistik variabel *independent* signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .
- Jika T-statistic $<$ T-tabel maka H_0 diterima yang berarti bahwa secara statistik variabel *independent* tidak signifikan mempengaruhi variabel *dependent*.

Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan konsep *p-value*, yaitu dengan membandingkan Probability T-Statistic masing-masing variable yang dapat dilihat dari hasil regresi yang tersedia pada menu *views* dengan tingkat keyakinan (α) tertentu.

- Jika probability t-statistic $>$ tingkat keyakinan (α), maka H_0 terima yang berarti bahwa secara statistik variabel *independent* tidak signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .
- Jika probability t-statistic $<$ tingkat keyakinan (α), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa secara statistik variabel *independent* signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .

b. Uji Signifikansi Model (Uji F)

Uji signifikansi model (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variable bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable tak bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai hasil uji (F-statistic) dari hasil regresi dengan nilai F-tabel yang diperoleh dari tabel distribusi F, yaitu:

- Jika F-statistic $>$ F-tabel maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel *independent* signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .

- Jika $F\text{-statistic} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel *independent* tidak signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .

Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan konsep *p-value*, yaitu dengan membandingkan Probability F-Statistic masing-masing variabel yang dapat dilihat dari hasil regresi yang tersedia pada menu *views* dengan tingkat keyakinan (α) tertentu.

- Jika Probability F-Statistic $>$ tingkat keyakinan (α), maka H_0 terima yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel *independent* tidak signifikan mempengaruhi variabel *dependent* .
- Jika Probability F-Statistic $<$ tingkat keyakinan (α), maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel *independent* signifikan mempengaruhi variabel *dependent*..

c. Uji Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*).

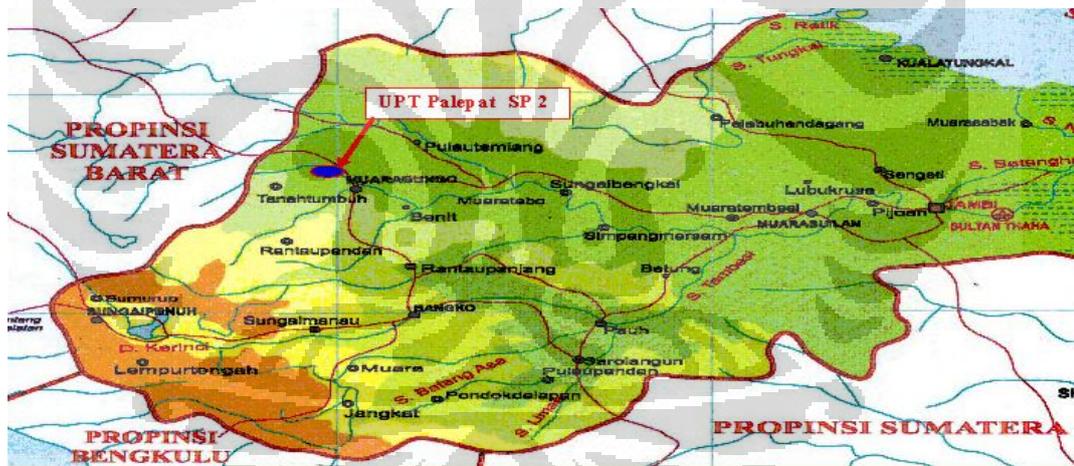
Uji koefisien determinasi adalah untuk melihat besarnya persentase total variasi *dependent variable* yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai **Adjusted R-Squared** hasil regresi, yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai **Adjusted R-Squared** atau mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin dapat diandalkan.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI

4.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Provinsi Jambi merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan pajang pantai 185 km dan terletak antara $0^{\circ} 45' 2^{\circ} 45' LS$ dan $101^{\circ} 0' - 104^{\circ} 55' BT$ dengan batas wilayah meliputi: Provinsi dan Kepulauan Riau di sebelah utara, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu disebelah barat, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Luas wilayah keseluruhan Provinsi Jambi yang meliputi wilayah daratan dan lautan adalah 50.160 km². Gambaran letak geografis Provinsi Jambi secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Peta Geografis Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat Sumatera Barat, Djambi dan Riau. Berdasarkan undang-undang tersebut wilayah administrasi Swatantra Tingkat I Jambi mencakup tiga wilayah Daerah Tingkat II, yaitu: Daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi.

Wilayah administrasi Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan, dimana sampai dengan sebelum era desentralisasi tahun 1999 jumlah Daerah Tingkat II di Provinsi Jambi bertambah menjadi enam, yaitu: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kota Jambi. Selanjutnya eforia pemekaran daerah yang terjadi di Provinsi Jambi sebagai dampak lahirnya Undang - Undang Otonomi Daerah membuat wilayah administratif Provinsi Jambi juga mengalami perkembangan dimana dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 terdapat empat daerah pemekaran baru, sehingga wilayah administrasi Provinsi Jambi menjadi sepuluh Daerah Tingkat II. Empat Daerah Tingkat II yang terbentuk setelah era otonomi daerah tersebut adalah: Kabupaten Sarolangun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2009 mencapai 2.834.164 orang yang terdistribusi pada 10 wilayah kabupaten/kota. Secara lebih rinci jumlah dan distribusi penduduk di wilayah Provinsi Jambi tahun 2009 tersaji pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Kota Jambi	243.249	232.789	476.038	16,80
2.	Muaro Jambi	160.308	154.290	314.598	11,10
3.	Kerinci	155.544	156.277	311.821	11,00
4.	Merangin	149.282	142.731	292.013	10,30
5.	Bungo	137.599	134.026	271.625	9,58
6.	Tebo	132.529	124.738	257.267	9,08
7.	Tanjung Jabung Barat	134.582	121.370	255.952	9,03
8.	Batanghari	114.325	108.516	222.841	7,86
9.	Sarolangun	108.208	110.020	218.228	7,70
10.	Tanjung Jabung Timur	109.157	104.624	213.781	7,54
	Jumlah Penduduk 2009	1.444.783	1.389.381	2.834.164	100,00

Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa daerah yang paling banyak penduduknya adalah Kota Jambi yaitu 476.038 jiwa atau 16,80 persen dari total penduduk di wilayah Provinsi Jambi, sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 213.781 jiwa atau 7,54 persen dari total penduduk di wilayah Provinsi Jambi.

Dibandingkan dengan luas wilayahnya, penduduk di wilayah Provinsi Jambi tergolong memiliki tingkat kepadatan yang jarang. Sampai dengan tahun 2009 kepadatan penduduk di Provinsi Jambi adalah sebesar 57 orang per kilometer persegi, artinya setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 57 orang penduduk. Dari sepuluh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jambi terdapat empat daerah yang memiliki kepadatan penduduk diatas kepadatan penduduk tingkat provinsi, yaitu kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan daerah lainnya memiliki tingkat kepadatan relatif rendah dibanding kepadatan penduduk pada tingkat provinsi, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Tingkat kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km ²)		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		(km ²)	(%)	(orang)	(%)	
1.	Kota Jambi	205	0,41	476.038	16,80	2.317
2.	Kerinci	3.747	7,47	311.821	11,00	83
3.	Muaro Jambi	5.326	10,62	314.598	11,10	59
4.	Bungo	4.659	9,29	271.625	9,58	58
5.	Tanjung Jabung Barat	4.650	9,27	255.952	9,03	55
6.	Tebo	6.461	12,88	257.267	9,08	40
7.	Tanjung Jabung Timur	5.445	10,86	213.781	7,54	39
8.	Batanghari	5.804	11,57	222.841	7,86	38
9.	Merangin	7.679	15,31	292.013	10,30	38
10.	Sarolangun	6.184	12,33	218.228	7,70	35
Jumlah 2009		50.160	100,00	2.834.164	100,00	57
2008		53.435		2.788.269		52
2007		53.435		2.742.196		51
2006		53.435		2.683.099		50
2005		53.435		2.657.536		50

Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Jambi yaitu 2.317 orang/km², diikuti Kabupaten Kerinci

dengan kepadatan penduduk 89 orang/km², Kabupaten Muaro Jambi dengan kepadatan penduduk 59 orang/km², dan Kabupaten Muaro Bungo 59 orang/km². Tingginya tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi yang mencapai 2.317 orang/km² boleh jadi disebabkan Kota Jambi merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jambi, disamping itu dengan luas wilayah Kota Jambi yang relatif paling kecil yaitu 205,43 m² atau 0,41persen dari luas wilayah Provinsi Jambi namun memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 476.038 jiwa atau 16,80 persen dari total penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk terendah adalah kabupaten Sarolangun yang memiliki kepadatan 35 orang/km².

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 50 orang/km² pada tahun 2005 menjadi 57 orang/km² pada tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan positif. Dilihat dari perkembangannya, pertumbuhan penduduk, Provinsi Jambi relatif stabil pada angka di bawah 2 persen. Dalam kurun waktu 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi 1,7 persen, sedangkan pada periode 2000-2009 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 1,83 persen sebagaimana tersaji pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990-2009

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan	
		1990	2000	2009	1990-2000	2000-2009
1.	Kota Jambi	339.944	417.507	476.038	2,08	1,47
2.	Kerinci	280.017	295.040	311.821	0,52	0,62
3.	Muaro Jambi	170.889	233.993	314.598	3,19	3,34
4.	Bungo	187.874	217.172	271.625	1,46	2,52
5.	Tanjung Jabung Barat	151.417	206.730	255.952	3,16	2,40
6.	Tebo	173.368	222.232	257.267	2,51	1,64
7.	Tanjung Jabung Timur	210.975	191.556	213.781	(0,96)	1,23
8.	Batanghari	155.252	190.636	222.841	2,07	1,75
9.	Merangin	209.895	254.203	292.013	1,93	1,55
10.	Sarolangun	140.937	178.097	218.228	2,37	2,28
Provinsi Jambi		2.020.568	2.407.166	2.834.164	1,77	1,83

Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, 2010

Dikaitkan dengan ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di provinsi Jambi pada tahun 2009 adalah sebanyak 2.002.357 orang atau 70,65 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2001, dimana jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2009 adalah sebanyak 1.613.150 orang atau 66,2 persen dari total jumlah penduduk, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Penduduk Usia Kerja Provinsi Jambi Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia Kerja	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Usia Kerja
1.	Kerinci	235.040	311.821	75,38
2.	Merangin	201.034	292.013	68,84
3.	Sarolangun	145.191	218.228	66,53
4.	Batanghari	153.948	222.841	69,08
5.	Muaro Jambi	216.303	314.598	68,76
6.	Tanjung Jabung Timur	153.928	213.781	72,00
7.	Tanjung Jabung Barat	174.547	255.952	68,20
8.	Tebo	180.673	257.267	70,23
9.	Muara Bungo	178.405	271.625	65,68
10.	Kota Jambi	363.288	476.038	76,31
Jumlah 2009		2.002.357	2.834.164	70,65
2001		1.613.150	2.439.644	66,12
1990		1.458.639	2.020.568	72,19

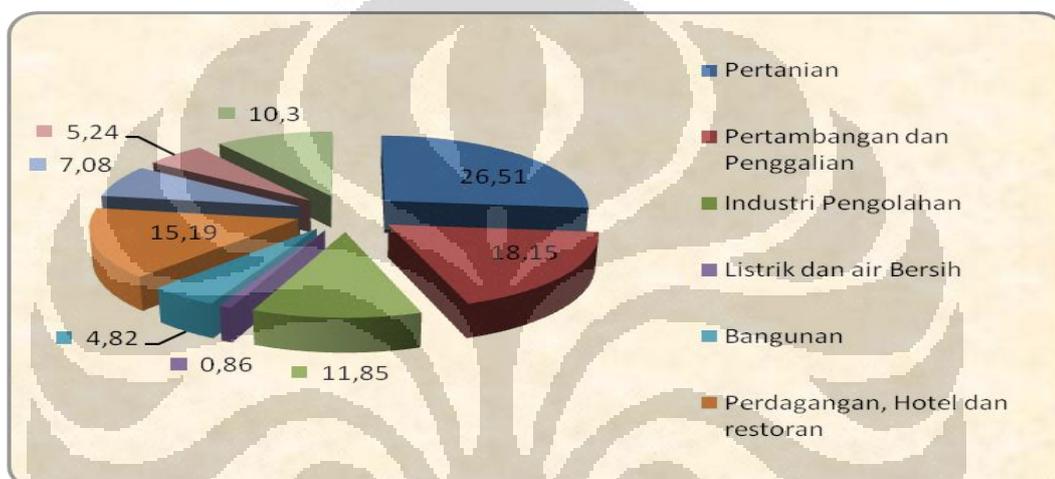
Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

4.3. Perekonomian Daerah Provinsi Jambi

4.3.1. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Sampai dengan tahun 2009 sektor pertanian masih merupakan sektor utama yang mendominasi perekonomian daerah di Provinsi Jambi dengan memberikan kontribusi sebesar 26,51 persen, dimana setiap tahunnya Sub Sektor Tanaman Perkebunan memberikan sumbangan tertinggi. Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian daerah di Provinsi Jambi tahun 2009 adalah Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 18,15 persen, dimana Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi memberikan sumbangan tertinggi yaitu 15,42 persen. Sektor-sektor lainnya yang tidak kalah pentingnya

dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyumbang PDRB Provinsi Jambi, adalah : Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 15,19 persen; Sektor Industri dan Pengolahan sebesar 11,85 persen; Sektor Jasa-jasa 10,30 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 7,08 persen; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,24 persen; dan Sektor Bangunan sebesar 4,82 persen. Sedangkan yang paing kecil kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2009 adalah Sektor Listrik dan Air bersih, yaitu hanya sebesar 0,86 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

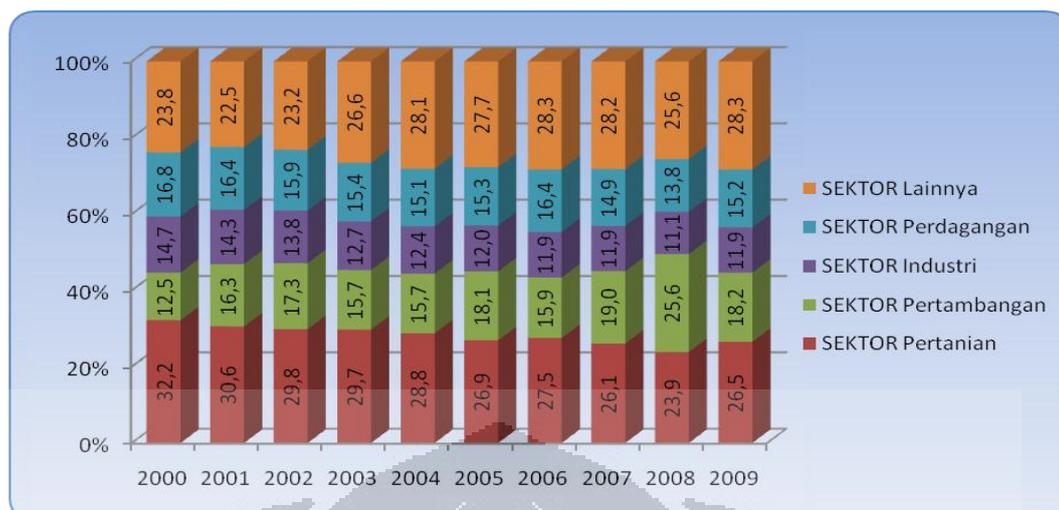


Gambar 4.2. Struktur Perekonomian Provinsi Jambi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2009

Sumber: BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka 2010.

Kondisi sektor pertanian yang menjadi *leading sector* ini dapat dipahami mengingat sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian, khususnya pada sub sektor perkebunan sawit dan karet.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Provinsi Jambi dalam sepuluh tahun terakhir (periode 2000-2009) belum banyak mengalami perubahan atau pergeseran, dimana sektor pertanian masih mendominasi walaupun kontribusinya cenderung mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 4.3. Pada grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah di provinsi Jambi menurun dari 32,2 persen pada tahun 2000 menjadi 26,5 persen pada tahun 2009.



Grafik 4.3. Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2000-2009

Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Disamping dari struktur pembentuk PDRB, perkembangan perekonomian juga dapat dilihat dari aspek penggunaan. PDRB Provinsi Jambi dilihat dari aspek penggunaan dalam 10 tahun terakhir (periode 2000-2009) menggambarkan bahwa sebagian besar PDRB digunakan untuk konsumsi rumah tangga, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5. Distribusi PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Penggunaan Tahun 2000-2009

Tahun	Konsumsi			Investasi	Ekspor Netto
	Rumah Tangga	Lembaga Swasta Nirlaba	Pemerintah		
2000	63.91	0.38	15.41	16.66	3.64
2001	63.41	0.38	15.18	17.39	3.65
2002	62.97	0.39	16.18	16.34	4.12
2003	66.65	0.47	16.73	16.71	-0.45
2004	67.25	0.53	16.84	16.57	-1.19
2005	69.57	0.52	15.31	16.13	-1.53
2006	66.69	0.5	17.07	17.82	-2.07
2007	62.93	0.44	16.16	19.63	0.83
2008	61.87	0.42	15.31	17.44	4.96
2009	62.65	0.56	17.03	19.99	-0.24

Sumber : BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Dari Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa pola distribusi PDRB Provinsi Jambi menurut penggunaan dari tahun 2000 sampai dengan 2009 tidak banyak

mengalami perubahan yang cukup berarti, hampir lebih dari 60 persen PDRB digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat jambi masih mengutamakan konsumsinya daripada melakukan investasi atau menabung, walaupun terdapat kecenderungan peningkatan melakukan investasi yang tergambar dari distribusi penggunaan PDRB untuk investasi yang meningkat dari 16,66 persen pada tahun 2000 menjadi 19,99 persen pada tahun 2009. Dari tabel 4.5 di atas juga terlihat ekspor netto yang berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan, dimana kontribusi ekspor netto terhadap PDRB mengalami penurunan dari 3,64 persen pada tahun 2000 menjadi -0,24 persen pada tahun 2009.

4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh PDRB atas dasar konstan 2000, dari tahun 2000 sampai dengan 2009 rata-rata pertumbuhannya mencapai 6,08 persen per tahun, dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 merupakan angka tertinggi yang mencapai 7,16 persen. Pada tahun 2001 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi jambi cenderung mengalami perlambatan tiap tahunnya, dan mencapai pertumbuhan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 5 persen. Namun mulai tahun 2004 hingga 2009 mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2009 sempat mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2004 ekonomi jambi tumbuh 5,38 persen, dan pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi terus meningkat menjadi 5,57 persen tahun 2005, 5,89 persen tahun 2006, kemudian 6,82 persen tahun 2007, dan 7,16 persen tahun 2008. Perubahan pertumbuhan ini mempengaruhi pola distribusi penggunaan PDRB, dimana pada rentang tahun 2001 sampai 2009 penggunaan terbesar adalah untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2009 penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga sebesar 62,65 persen atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 61,87 persen.

Selanjutnya dilihat dari sektornya, pada tahun 2009 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi adalah pada Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai 17,85 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2001-2009 masing-masing sektor dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.6. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Sektor Tahun 2001-2009

NO	SEKTOR	TAHUN								
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	3,71	4,85	3,56	5,08	4,61	11,34	4,57	5,72	6,56
2	Pertambangan dan Penggalian	29,39	(1,52)	2,82	0,65	1,04	(7,29)	9,60	14,70	0,71
3	Industri Pengolahan	3,63	10,09	2,36	3,55	3,90	4,44	5,45	5,63	4,86
4	Listrik dan air Bersih	6,04	16,05	22,10	13,03	5,10	7,38	4,47	7,28	9,27
5	Bangunan	1,66	33,98	26,79	25,75	20,48	6,67	14,58	10,28	8,45
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	2,84	5,67	6,32	6,03	9,04	7,90	6,25	3,99	7,56
7	Angkutan dan Komunikasi	8,10	5,36	4,94	6,47	7,10	5,94	7,14	3,37	5,81
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	(8,93)	3,13	13,98	14,38	8,42	5,77	19,06	23,88	17,85
9	Jasa-jasa	4,42	9,67	4,82	3,48	3,21	4,07	5,62	4,99	6,24
	Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,37

Sumber : BPS, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Sedangkan dilihat dari kondisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota, secara umum pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi menunjukkan angka positif pada rentang 5 persen hingga 8,42 persen, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2009

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN								
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kerinci	3,56	4,36	4,80	5,01	5,08	5,31	5,89	5,86	5,88
2	Merangin	3,61	3,70	4,07	4,84	5,19	4,80	7,02	5,99	8,42
3	Sarolangun	7,94	5,69	5,30	5,77	5,36	7,82	7,27	7,62	6,32
4	Batanghari	7,23	4,14	4,02	5,15	5,84	5,12	5,60	6,24	5,14
5	Muaro Jambi	8,57	2,18	3,38	4,09	4,62	4,73	4,97	5,31	5,52
6	Tanjung Jabung Timur	6,54	3,03	4,12	4,41	3,67	0,88	4,71	5,71	5,00
7	Tanjung Jabung Barat	7,40	7,47	7,89	7,92	7,81	7,91	7,97	5,99	6,39
8	Tebo	4,15	4,25	4,31	4,64	4,74	9,69	5,95	6,08	5,01
9	Muara Bungo	3,85	4,45	4,74	4,75	5,39	9,43	8,80	11,13	6,40
10	Kota Jambi	5,28	3,34	4,84	5,03	5,69	5,93	7,16	6,14	6,47
	Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,37

Sumber : BPS, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan angka positif yang secara simultan menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan, meskipun sedikit melambat bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari tabel juga terlihat bahwa pada tahun 2009 terdapat empat

kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan di atas pertumbuhan tingkat provinsi (6,37 persen) yaitu: Kabupaten Merangin (8,42 persen), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (6,39 persen), Kabupaten Bungo (6,40 persen), dan Kota Jambi (6,47 persen). Sedangkan beberapa kabupaten yang pada tahun 2009 mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya adalah: Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Bungo.

4.3.3. Perkembangan Investasi.

Investasi di Provinsi Jambi, khususnya pada sektor industri terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah realisasi investasi selama kurun waktu 1990-2008 dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Jika pada tahun 1990 jumlah realisasi PMDN berjumlah Rp 342 milyar, pada tahun 2008 sudah mencapai angka Rp 29.700 milyar. Demikian halnya dengan realisasi PMA yang pada tahun 1995 berjumlah Rp 61,04 milyar, maka pada tahun 2008 sudah mencapai Rp 5.607 milyar.

Seiring dengan meningkatnya nilai realisasi investasi tersebut, jumlah Perusahaan PMDN dan Perusahaan PMA juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1990 beroperasi 57 Perusahaan PMDN dan 3 Perusahaan PMA maka sampai dengan tahun 2008 telah beropersi 126 Perusahaan PMDN dan 95 Perusahaan PMA.

Dari seluruh jumlah Perusahaan PMDN dan PMA tersebut, hampir 33 persen perusahaan PMDN dan PMA berada di Kota Jambi. Sementara dari jumlah penyerapan tenaga kerja, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja paling besar walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif sedikit, dimana selama periode waktu 1993-2006 Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu menyerap tenaga kerja rata-rata 27,63 persen setiap tahunnya dari total tenaga kerja.

4.4. Keuangan Daerah

Untuk menjalankan fungsi atau kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, faktor keuangan merupakan suatu hal yang

sangat penting, karena hampir tidak ada program atau kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah. Semakin besar jumlah dana yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan program atau kegiatan pemerintahan yang dapat dilaksanakan. Apalagi dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dan memanfaatkan penerimaan tersebut untuk membiayai program-program pembangunan daerah yang tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Kemampuan keuangan masing-masing daerah tersebut pada umumnya berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian halnya dengan kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi yang menunjukkan beragam perbedaan baik dari sisi penerimaan daerah maupun belanja daerahnya. Sampai dengan tahun 2008, kabupaten/kota di Provinsi yang memiliki jumlah pendapatan terbesar adalah Kota Jambi dengan realisasi Penerimaan APBD sebesar Rp 593 milyar, diikuti dengan Kabupaten Muara Bungo sebesar Rp 542 milyar, dan Kabupaten Kerinci sebesar Rp 521 milyar. Sedangkan Kabupaten dengan pendapatan terendah adalah Kabupaten Sarolangun dengan pendapatan daerah sebesar Rp 444 milyar, diikuti Kabupaten Tebo sebesar Rp 461 milyar. Selengkapnya perkembangan belanja daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 4.8 .

Pada Tabel 4.8 tersebut terlihat bahwa pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan, terutama setelah era desentralisasi fiskal. Pada era desentralisasi fiskal tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, kabupaten dengan tingkat perkembangan pendapatan paling tinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang pendapatan daerahnya meningkat hampir 6 kali, yaitu dari Rp 82 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 512 milyar tahun 2008 atau meningkat hampir 75 persen per tahun. Sedangkan Kabupaten Kerinci merupakan daerah dengan tingkat perkembangan pendapatan paling

rendah yaitu 36 persen per tahun, dimana pendapatan daerahnya pada tahun 2001 adalah Rp 147 milyar meningkat menjadi Rp 521 milyar tahun 2008.

Tabel 4.8. Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1995-2008 (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten / Kota	Sebelum Desentralisasi Fiskal		Setelah Desentralisasi Fiskal	
	1995	2000	2001	2008
Kota Jambi	33.633,22	87.690,90	157.238,35	593.051,89
Batanghari	42.127,19	81.586,04	132.786,56	478.011,02
Muaro Jambi	-	-	105.417,71	494.261,34
Tanjungjabung Barat	30.515,71	81.079,86	123.273,55	521.148,32
Tanjungjabung Timur	-	-	82.392,59	512.607,82
Merangin	39.486,68	91.542,33	114.596,31	504.140,18
Sarolangun	-	-	122.951,58	444.913,92
Muara Bungo	36.160,85	95.507,79	148.172,48	542.399,12
Tebo	-	-	92.234,04	461.942,85
Kerinci	26.811,85	62.464,68	147.846,79	521.799,77
Jumlah	208.735,49	499.871,59	1.226.909,96	5.074.276,23

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Selain realisasi pendapatan, realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya perbedaan. Jumlah realisasi belanja biasanya akan mengikuti jumlah realisasi penerimaan, dimana daerah dengan kapasitas pendapatan daerah yang besar, cenderung memiliki realisasi belanja yang besar juga. Sampai dengan tahun 2008, dua kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah pendapatan terbesar yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Muara Bungo, juga merupakan daerah dengan realisasi belanja APBD terbesar yaitu Rp 610 milyar untuk Kota Jambi dan sebesar Rp 601 milyar untuk Kabupaten Bungo. Demikian halnya dengan dua kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah pendapatan terendah yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo, juga merupakan daerah dengan realisasi belanja APBD terendah yaitu Rp 500 milyar untuk Kabupaten Sarolangun dan sebesar Rp 513 milyar untuk Kabupaten Tebo. Selengkapanya perkembangan belanja daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1995-2008 (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten / Kota	Sebelum Desentralisasi Fiskal		Setelah Desentralisasi Fiskal	
	1995	2000	2001	2008
Kota Jambi	33.379,33	147.647,59	198.145,67	610.463,02
Batanghari	42.094,00	71.146,35	121.677,70	530.352,43
Muaro Jambi	-	-	102.692,36	588.848,33
Tanjungjabung Barat	29.360,91	70.982,56	103.867,95	550.953,92
Tanjungjabung Timur	-	-	69.796,31	564.751,18
Merangin	38.171,01	84.822,34	101.810,38	507.597,65
Sarolangun	-	-	96.975,66	500.871,46
Muara Bungo	35.191,41	85.370,59	132.916,30	601.546,29
Tebo	-	-	71.412,99	513.933,39
Kerinci	26.541,71	62.447,75	146.492,65	523.424,12
Jumlah	204.738,37	522.417,18	1.145.787,96	5.492.741,78

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Mengikuti perkembangan pendapatan daerah yang terus meningkat, maka dari tabel di atas terlihat bahwa belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga terus mengalami peningkatan, terutama setelah era desentralisasi fiskal. Pada era setelah desentralisasi fiskal tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, kabupaten dengan tingkat perkembangan belanja paling tinggi adalah kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang pendapatan daerahnya meningkat hampir 8 kali, yaitu dari Rp 69 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 564 milyar tahun 2008 atau meningkat lebih dari 100 persen per tahun. Sedangkan Kota Jambi merupakan daerah dengan tingkat perkembangan belanja paling rendah yaitu 30 persen per tahun, dimana belanja daerahnya pada tahun 2001 adalah Rp 198 milyar meningkat menjadi Rp 610 milyar tahun 2008.

BAB 5

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 5 ini akan menguraikan gambaran dan analisis terkait dengan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi, dan juga akan menjelaskan pengaruh dari variabel desentralisasi fiskal dan variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang dilakukan dengan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) terhadap spesifikasi model ekonometrika yang telah dirumuskan pada Bab 3 yang dilakukan dengan menggunakan *software eviews*.

5.1. Hasil Analisis Data

5.1.1. Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jambi

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan mulai tahun 2001 telah membawa perubahan dalam pola perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana sesuai dengan prinsip *money follow function* dalam desentralisasi fiskal maka untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, kepada daerah diberikan sumber-sumber pendanaan terutama melalui dana perimbangan. Hal tersebut tentunya membawa implikasi langsung terhadap peningkatan kapasitas pendapatan dan belanja seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Perubahan signifikan terhadap kapasitas pendapatan dan belanja daerah tersebut juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001, dimana sepanjang periode *pasca* desentralisasi fiskal 2001 sampai dengan tahun 2008 total pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat sangat tajam. Jumlah total realisasi pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat dari Rp 1.226 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 5.074 milyar pada tahun 2008 atau rata-rata meningkat 45 persen per tahun, sementara

realisasi belanja meningkat dari Rp 1.145 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 5.492 milyar pada tahun 2008, atau rata-rata meningkat 54 persen per tahun.

Namun demikian, peningkatan jumlah pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersebut tidak diiringi dengan kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komposisi atau struktur pendapatan daerah yang dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 masih menunjukkan ketergantungan daerah terhadap transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan dan Kontribusinya terhadap Total penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2001-2008

Kabupaten / Kota	2001		2008	
	Jumlah (Rp Juta)	% thd pendapatan daerah	Jumlah (Rp Juta)	% thd pendapatan daerah
Kota Jambi	133.778	85,08	503.237	84,86
Batanghari	121.395	91,42	398.038	83,27
Muaro Jambi	90.174	85,54	444.740	89,98
Tanjungjabung Barat	110.546	89,68	469.691	90,13
Tanjungjabung Timur	76.963	93,41	425.222	82,95
Merangin	102.385	89,34	446.513	88,57
Sarolangun	109.815	89,32	395.114	88,81
Muara Bungo	121.962	82,31	414.954	76,50
Tebo	76.431	82,87	395.889	85,70
Kerinci	131.711	89,09	454.082	87,02
Jumlah	1.075.160	87,63	4.347.480	85,68

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai tahun penerbitan, data diolah .

Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari 85 persen penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 2001-2008 bersumber dari Dana Perimbangan. Walaupun ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2008 porsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 85,68 persen menurun 1,95 persen dibanding dengan tahun 2001 sebesar 87,63 persen. Yang perlu dicermati dari tabel 5.1 di atas adalah, walaupun secara rata-rata terjadi penurunan tingkat ketergantungan pada

Dana Perimbangan, namun beberapa kabupaten/kota justru menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan yang makin meningkat, yang tercermin dari peningkatan porsi penerimaan Dana Perimbangan.

Disisi lain, sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun nilainya menunjukkan kenaikan secara nominal, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan awal implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2001-2008

Kabupaten / Kota	2001		2008	
	Jumlah (Rp Juta)	% thd pendapatan daerah	Jumlah (Rp Juta)	% thd pendapatan daerah
Kota Jambi	15.092	9,60	54.087	9,12
Batanghari	3.570	2,69	20.855	4,36
Muaro Jambi	5.593	5,31	12.719	2,57
Tanjungjabung Barat	7.405	6,01	20.909	4,01
Tanjungjabung Timur	1.751	2,12	19.021	3,71
Merangin	4.833	4,22	27.762	5,51
Sarolangun	3.242	2,64	17.853	4,01
Muara Bungo	11.387	7,69	64.573	11,91
Tebo	9.118	9,89	16.998	3,68
Kerinci	3.617	2,45	31.200	5,98
Jumlah	65.609	5,35	285.977	5,64

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Dari Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa secara nominal total PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat dari Rp 65 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 285 milyar pada tahun 2008, namun kontribusinya terhadap total penerimaan daerah tidak mengalami perubahan pada angka yang relatif kecil yaitu hanya sekitar 5 persen. Bahkan kontribusi PAD pada empat kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan, yaitu: Kabupaten Tebo persentase PAD terhadap total pendapatan daerahnya menurun tajam dari 9,89 persen pada tahun 2001 menjadi hanya 3,68 persen pada tahun 2008, Kabupaten Muaro Jambi turun dari 5,31 persen pada tahun 2001 menjadi 2,57 persen pada tahun 2008, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

turun dari 6,01 persen pada tahun 2001 menjadi 4,01 persen pada tahun 2008, dan terakhir Kota Jambi turun dari 9,60 persen pada tahun 2001 menjadi 9,12 persen pada tahun 2008.

Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah *pasca* implementasi desentralisasi fiskal, maka alokasi dan realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga semakin meningkat. Peningkatan belanja tersebut diharapkan dapat lebih bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, untuk itu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berusaha untuk mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan belanja untuk pelayanan publik yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun *pasca* implementasi desentralisasi fiskal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2001-2008

Kabupaten / Kota	2001					2008				
	Belanja Rutin		Belanja Pembangunan		Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung		Jumlah
	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)
Kota Jambi	135.727,43	91,93	11.920,16	8,07	147.647,59	310.552,60	50,87	299.910,42	49,13	610.463,02
Batanghari	76.523,09	62,89	45.154,61	37,11	121.677,70	258.535,12	48,75	271.817,31	51,25	530.352,43
Muara jambi	80.626,78	78,51	22.065,58	21,49	102.692,36	224.954,31	38,20	363.894,02	61,80	588.848,33
Tanjungjabung Barat	55.863,03	53,78	48.004,92	46,22	103.867,95	154.690,50	28,08	396.263,42	71,92	550.953,92
Tanjungjabung Timur	44.227,23	63,37	25.569,08	36,63	69.796,31	168.641,26	29,86	396.109,92	70,14	564.751,18
Merangin	80.424,00	78,99	21.386,38	21,01	101.810,38	240.390,74	47,36	267.206,90	52,64	507.597,64
Sarolangun	62.542,08	64,49	34.433,58	35,51	96.975,66	154.942,56	30,93	345.926,89	69,07	500.869,45
Muara Bungo	90.348,39	67,97	42.567,91	32,03	132.916,30	246.410,47	40,96	355.135,81	59,04	601.546,28
Tebo	47.999,13	67,21	23.413,86	32,79	71.412,99	148.024,82	28,80	365.908,57	71,20	513.933,39
Kerinci	116.320,95	79,40	30.171,70	20,60	146.492,65	331.400,93	63,31	192.023,18	36,69	523.424,11
Jumlah	790.602,11	72,18	304.687,78	27,82	1.095.289,89	2.238.543,31	40,75	3.254.196,44	59,25	5.492.739,75

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai tahun penerbitan, data diolah.

Dari Tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk pelayanan publik

yang tercermin dari realisasi belanja pembangunan dan realisasi belanja langsung menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan awal tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada tahun 2008 porsi belanja pelayanan publik yang tercermin dari belanja langsung seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi mencapai angka 59,25 persen dari total belanja, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan porsi belanja pelayanan publik tahun 2001 yang hanya sebesar 27,82 persen dari total belanja. Jika dicermati lebih jauh, belanja pelayanan publik tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja modal, dimana untuk tahun 2008 dari total belanja pelayanan publik seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar Rp 3.254 milyar, sejumlah Rp 2.004 milyar atau 61,59 persen digunakan untuk belanja modal, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4. Komposisi Realisasi Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2008

Kabupaten / Kota	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal		Jumlah
	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(%)	
Kota Jambi	55.216,90	18,41	120.727,06	40,25	123.966,46	41,33	299.910,42
Batanghari	26.288,68	9,67	87.804,65	32,30	157.723,98	58,03	271.817,31
Muaro Jambi	39.127,79	10,75	77.824,66	21,39	246.941,57	67,86	363.894,02
Tanjungjabung Barat	34.441,52	8,69	84.591,98	21,35	277.229,92	69,96	396.263,42
Tanjungjabung Timur	3.264,74	0,82	121.010,35	30,55	271.834,83	68,63	396.109,92
Merangin	37.543,06	14,05	84.380,74	31,58	145.283,10	54,37	267.206,90
Sarolangun	49.718,89	14,37	131.184,23	37,92	165.025,77	47,71	345.928,89
Muara Bungo	27.216,88	7,66	86.915,78	24,47	241.003,15	67,86	355.135,81
Tebo	24.475,32	6,69	63.815,53	17,44	277.617,72	75,87	365.908,57
Kerinci	22.338,15	11,63	71.953,36	37,47	97.731,67	50,90	192.023,18
Jumlah	319.631,93	9,82	930.208,34	28,58	2.004.358,17	61,59	3.254.198,44

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, tahun 2008-2009, data diolah.

Pergeseran pola belanja yang mengarah pada peningkatan komposisi belanja pelayanan publik tersebut, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hal tersebut diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah sehingga

dalam jangka panjang diharapkan meningkatkan kinerja perekonomian daerah di Provinsi Jambi.

5.1.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi

Identifikasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi akan dilakukan dengan menggunakan analisis data panel dengan mengadopsi spesifikasi model yang dikembangkan oleh Akai dan Sakata (2002) dan Wibowo (2008), yaitu:

$$\mathbf{EcoGrowth}_{it} = \alpha_0 + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\beta} + \alpha_1\mathbf{DF}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana, **EcoGrowth** adalah Pertumbuhan ekonomi daerah, **X** adalah variabel kontrol, **DF** adalah Indikator Desentralisasi Fiskal, **β** adalah parameter vektor, dan $\varepsilon = \text{error term}$.

Penggunaan variabel kontrol, yang dalam dalam penelitian ini terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan Level Awal PDRB, dimaksudkan agar pengaruh desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat secara bersama-sama dengan variabel lain dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

5.1.2.1. Hasil Pengujian Metode Analisis

Mengingat data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel, maka terdapat tiga metode analisis yang dapat digunakan untuk mengestimasi model penelitian di atas, yaitu: metode *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel atau unit *cross section* yang digunakan merupakan keseluruhan populasi yaitu sebanyak 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, dan untuk menangkap karakteristik spesifik masing-masing kabupaten/kota maka model analisis data panel yang akan digunakan adalah metode *Fixed Effect*.

Untuk meyakinkan ketepatan penggunaan metode *Fixed Effect*, penulis melakukan beberapa pengujian statistik yaitu: (1) Uji signifikansi *Fixed Effect* melalui Uji-F; dan (2) Uji signifikansi *Random Effect* melalui Uji Hausman.

(1) Hasil Uji-F

Uji-F digunakan untuk menentukan antara metode *Common Effect* atau *Fixed Effect* sebagai metode yang tepat untuk melakukan analisis data panel. Hasil Uji- F dengan menggunakan program *eviews* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.5. Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect* melalui Uji-F

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: RUNDFJAMBI2			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.604616	(8,89)	0.0132

Sumber: Output Eviews

Dari tabel hasil Uji- F di atas dapat dilihat bahwa nilai F- test 2,604616 dengan probabilitas sebesar 0,0132 atau lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang berarti hipotesa H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Fixed Effect* merupakan metode analisis yang lebih sesuai untuk digunakan.

(2) Hasil Uji Hausman

Selanjutnya untuk menentukan antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* sebagai metode yang tepat untuk melakukan analisis data panel dilakukan melalui Uji Hausman. Hasil Uji Hausman dengan menggunakan program *eviews* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.6. Hasil Uji Signifikansi *Random Effect* melalui Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: RUNDFJAMBI2			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.435030	4	0.0769

Sumber: Output Eviews

Dari tabel hasil Uji Hausman di atas dapat dilihat bahwa nilai Chi Square adalah sebesar 8,43503 dengan probabilitas sebesar 0,079 atau lebih

kecil dari $\alpha = 10\%$,. Hal tersebut berarti bahwa pada $\alpha = 10\%$, hipotesa H_0 ditolak sehingga metode *Fixed Effect* merupakan metode analisis yang lebih sesuai untuk digunakan.

Berdasarkan hasil Uji F dan Uji Hausman di atas dapat disimpulkan bahwa metode *fixed effect* merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel pada penelitian ini.

5.1.2.2. Hasil Estimasi Model Ekonometrika

Estimasi terhadap model ekonometrika yang telah dirumuskan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan 3 regresi utama, yaitu: (1) Regresi atas variabel kontrol, yang dilakukan untuk menegaskan kembali pengaruh variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Regresi variabel kontrol dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal (*post 2001*), yang dilakukan untuk melihat efek penerapan kebijakan desentralisasi terhadap perubahan pola pertumbuhan ekonomi daerah *pasca* pelaksanaan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001; (3) Regresi penuh dengan memasukkan *interaction term* antara indikator desentralisasi fiskal dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal (*post 2001*), yang dilakukan untuk melihat atau menguji masing-masing indikator desentralisasi fiskal dan pengaruh perubahan era desentralisasi fiskal. Dalam regresi ini, masing-masing indikator desentralisasi fiskal (6 indikator) dimasukkan satu per satu dalam model ekonometrik secara bergantian, untuk melengkapi variabel kontrol.

(1) Regresi atas Variabel Kontrol

Untuk melihat pengaruh variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, dilakukan regresi terhadap model persamaan ekonometrika 3.2, yaitu:

$$\begin{aligned} \ln(\text{PDRBPC})_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{INVESTASI})_{it} + \alpha_2 \ln(\text{HUMANCAP})_{it} + \\ & \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \ln(\text{PDRB_AWAL})_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Hasil regresi terhadap persamaan di atas dengan menggunakan Metode *Fixed Effect* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.7. Hasil Regresi Variabel kontrol dengan Metode *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ln (PDRB_AWAL)	0.820892	0.069309	11.84397	0.0000
Ln (HUMANCAP)	0.136326	0.042894	3.178241	0.0020
Ln (INVESTASI(-1))	0.014686	0.004870	3.015548	0.0033
POPGROWTH	0.012681	0.004776	2.655197	0.0094
Adjusted R-squared	0.897995			
F-statistic	78164.52			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	2.088038			

Sumber: Output Eviews (Lampiran 1)

Dalam bentuk persamaan, hasil estimasi model di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Ln(PDRBPC)_{it} = & 0,0147 Ln(INVESTASI(-1))_{it} + 0,1363Ln(HUMANCAP)_{it} + \\ & 0,0127POPGROWTH_{it} + 0,8209 Ln(PDRB_AWAL)_{it} \dots\dots \quad (5.1) \end{aligned}$$

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa secara statistik model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dengan faktor-faktor yang secara empiris merupakan penentu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,89 atau mendekati 1. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,8979 menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model ini dapat menjelaskan 89,79 persen pengaruhnya terhadap variabel terikat, sedangkan sebesar 10,21 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil regresi di atas juga menunjukkan bahwa variabel kontrol yang secara empiris merupakan determinan pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam penelitian ini terdiri dari Level Awal PDRB, Investasi, dan Akumulasi Modal Manusia telah ditegaskan kembali dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara simultan melalui Uji F yang menunjukkan nilai probabilitas F-statistik 0,000, dimana nilai probabilitas yang diperoleh tersebut lebih kecil dari alpha 1 persen ($0,000 < 0,01$), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel kontrol secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Demikian halnya dengan hasil pengujian secara parsial melalui Uji - t, dimana nilai probabilitas *t-statistic* untuk seluruh variabel kontrol lebih kecil dari alpha yang ditetapkan sebesar 1%, dan tanda koefisien untuk seluruh variabel kontrol menunjukkan tanda yang benar, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investasi, modal manusia dan pertumbuhan penduduk, dan PDRB riil perkapita tahun sebelumnya akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

(2) Regresi Variabel Kontrol dengan Variabel *dummy* Desentralisasi Fiskal

Untuk melihat efek penerapan kebijakan desentralisasi terhadap perubahan pola pertumbuhan ekonomi daerah *pasca* pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001, dilakukan regresi terhadap model persamaan ekonometrika 3.3, yaitu:

$$\begin{aligned} \ln(\text{PDRBPC})_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{INVESTASI})_{it} + \alpha_2 \ln(\text{HUMANCAP})_{it} + \\ & \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \ln(\text{PDRB_AWAL})_{it} + \\ & \alpha_5 \text{dummyDF} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Hasil regresi terhadap persamaan di atas dengan menggunakan Metode *Fixed Effect* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.8. Hasil Regresi Variabel Kontrol dengan Variabel *dummy* Desentralisasi Fiskal menggunakan Metode *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ln (PDRBPC_AWAL)	0.695208	0.081459	8.534403	0.0000
Ln (HUMANCAP)	0.131399	0.041332	3.179096	0.0020
Ln (INVESTASI(-1))	0.015357	0.005868	2.616900	0.0104
POGROWTH	0.012093	0.004575	2.643558	0.0097
DUMMYDF	0,149198	0,071449	2,899934	0,0047
Adjusted R-squared	0.906645			
F-statistic	58376.03			
Prob (F-statistic)	0.000000			
DW- stat	2.170050			

Sumber: Output Eviews (Lampiran 2)

Hasil estimasi model di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln(PDRBPC)}_{it} = & 0,0153 \text{Ln(INVESTASI(-1))}_{it} + 0,1314 \text{Ln(HUMANCAP)}_{it} \\ & + 0,0121 \text{POPGROWTH}_{it} + 0,6952 \text{Ln(PDRB_AWAL)}_{it} \\ & + 0,1492 \text{DUMMYDF} \dots\dots\dots (5.2) \end{aligned}$$

Hasil regresi (5.2) di atas jika dibandingkan dengan hasil regresi sebelumnya (5.1) maka terlihat bahwa tidak terdapat perubahan tanda (*magnitude*), dimana untuk seluruh variabel kontrol yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan Level Awal PDRB tetap positif dan signifikan pada alpha 1% . Hal menarik dari hasil regresi di atas adalah bahwa variabel *dummy* desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, hal ini terlihat dari nilai koefisien variabel *dummy* desentralisasi fiskal adalah positif dan nilai probabilitas t-statistik 0,0047 secara statistik signifikan pada alpha 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001 relatif lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelum tahun 2001.

(3) Regresi Penuh (*Full Regression*)

Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap indikator desentralisasi fiskal (enam indikator) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memperhitungkan *structural break* pada tahun 2001, maka penulis melakukan regresi penuh dengan memasukkan *interaction term* antara indikator desentralisasi fiskal dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal (*post 2001*), dengan spesifikasi model persamaan ekonometrika 3.4, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Ln(PDRBPC)}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln(INVESTASI(-1))}_{it} + \alpha_2 \text{Ln(HUMANCAP)}_{it} + \\ & \alpha_3 \text{POPGROWTH}_{it} + \alpha_4 \text{Ln(PDRB_AWAL)}_{it} + \alpha_5 \text{DF}_{it} + \\ & \alpha_6 \text{dummyDF*DF}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Hasil regresi yang dilakukan dengan memasukkan satu satu per satu indikator desentralisasi fiskal dalam model ekonometrika dapat dilihat pada

Lampiran 3, sedangkan ikhtisar hasil regresi atas variabel Indikator Desentralisasi Fiskal disajikan dalam **Tabel 5.9**, sebagai berikut:

Table 5.9. Ikhtisar Hasil Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal yang Berinteraksi dengan Variabel *Dummy*

Indikator Desentralisasi Fiskal		Koefisien (<i>P-Value</i>)
A. Indikator Pengeluaran		
1.	Rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat (EI-1)	-6,4279 (0,0002)
2.	EI-1* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	4,5956 (0,0004)
B. Indikator Pendapatan		
1.	Rasio pendapatan daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat (RI-1)	-7,6922 (0,0002)
2.	RI-1* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	4,4692 (0,0003)
3.	Rasio pendapatan daerah (tidak termasuk dana perimbangan) terhadap pendapatan pemerintah pusat (RI-2)	-10,7776 (0,0450)
4.	RI-2* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	8,1203 (0,0457)
C. Indikator Otonomi		
1.	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (AI-1)	0,0024 (0,3356)
2.	AI-1* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	0,0048 (0,0075)
3.	Rasio PAD terhadap total pengeluaran daerah (A2-1)	0,0025 (0,3357)
4.	AI-2* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	0,0041 (0,0124)
5.	Rasio PAD terhadap total Dana Perimbangan (A3-1)	0,0006 (0,7703)
6.	AI-3* <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal	0,0031 (0,0237)

Sumber: Output Eviews (Lampiran 3)

Dari Tabel 5.9 di atas terlihat bahwa secara umum seluruh indikator desentralisasi fiskal setelah berinteraksi/disandingkan dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal (*dummyDF*), menghasilkan nilai estimasi yang positif dan signifikan setidaknya pada alpha 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

pola pendelegasian fiskal sejak implementasi desentralisasi fiskal 2001 secara umum dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi yang lebih baik dibandingkan dengan pola pendelegasian fiskal periode sebelumnya.

5.1.2.3. Pengujian Asumsi Klasik

Selain pengujian yang telah dilakukan terhadap model sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini juga dilakukan beberapa uji asumsi klasik untuk meyakinkan bahwa hasil regresi terbebas dari masalah Autokorelasi, Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas

Autokorelasi muncul karena adanya korelasi antar anggota observasi satu dengan observasi lain yang berurutan sepanjang waktu. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan Uji Autokorelasi dengan menggunakan Metode Durbin-Watson, dengan kaidah atau ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2004):

- $DW < d_L$ = terdapat autokorelasi positif
- $d_L < DW < d_U$ = tidak ada kesimpulan
- $d_U < DW < 4 - d_U$ = Tidak ada autokorelasi
- $4 - d_U < DW < 4 - d_L$ = tidak ada kesimpulan
- $DW > 4 - d_L$ = terdapat autokorelasi negatif

Dengan menggunakan Tabel Durbin Watson pada $\alpha=5\%$, $n=102$ observasi, dan k = sebanyak variabel bebas (tidak termasuk konstanta), hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW dari seluruh hasil regresi berada diantara d_U dan $4 - d_U$ ($d_U < DW < 4 - d_U$), sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi selengkapnya disajikan pada Lampiran 5.

Sedangkan masalah multikolinieritas muncul karena adanya hubungan yang erat antara variabel independen di dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi masalah multikolinieritas tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen dengan *rule of thumb* yaitu jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model, dan sebaliknya (Widarjono,

2007). Hasil pengujian menunjukkan bahwa korelasi (r) antar variabel independen dari seluruh model regresi adalah dibawah 0,85 sehingga disimpulkan tidak ada masalah multikolinieritas. Hasil Uji Multikolinieritas selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.

Sedangkan masalah heteroskedastisitas telah diatasi saat pengolahan data dengan *White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors and Variance* yang tersedia pada *software* pengolah data *Eviews*.

5.2. Pembahasan

5.2.1. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi

Hasil estimasi dari model persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 secara umum memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil regresi model persamaan ekonometrika 3.3 pada persamaan (5.2) dimana koefisien variabel *dummy* desentralisasi fiskal bertanda positif dan signifikan, dan hasil regresi model persamaan ekonometrika 3.4 pada Tabel 5.9 dimana koefisien seluruh variabel desentralisasi fiskal yang terdiri dari indikator pengeluaran, indikator pendapatan, dan indikator otonomi, menghasilkan nilai estimasi yang positif dan signifikan ketika disandingkan/berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal.

Penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing indikator desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indikator Pengeluaran

Indikator Pengeluaran (EI-1) yang merupakan rasio pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah pusat menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dimana Indikator Pengeluaran (EI-1) setelah berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal menghasilkan estimasi koefisien yang positif dan

signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan rasio belanja pemerintah daerah di Provinsi Jambi telah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi yang lebih baik *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001. Hal tersebut dapat dipahami, karena secara implisit peningkatan jumlah belanja pemerintah daerah mencerminkan peningkatan investasi publik di masyarakat, dimana investasi publik akan memiliki dampak produktivitas langsung terhadap perekonomian sebagaimana investasi sektor swasta.

Lebih lanjut, dengan desain desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini yang menitikberatkan pada sisi pengeluaran, maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah adalah diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing masing daerah, sehingga pengaruh belanja daerah terhadap kinerja perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah. Demikian halnya dengan pengaruh positif Indikator Pengeluaran (EI-1) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari komposisi dan pola alokasi belanja pemerintah daerah di Provinsi Jambi *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah belanja pelayanan publik untuk membiayai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan jika merujuk pada penjelasan sebelumnya sebagian besar belanja pelayanan publik tersebut digunakan untuk belanja modal. Peningkatan belanja pelayanan publik, khususnya belanja modal tersebut tentunya akan meningkatkan stok modal daerah, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan pergeseran dan peningkatan komposisi belanja pelayanan publik tersebut, UNDP (2008) mengemukakan bahwa dalam jangka pendek perubahan pola belanja aparatur atau belanja rutin dan pembangunan atau belanja langsung di daerah akan menciptakan permintaan barang dan jasa yang dapat mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sedangkan dalam jangka panjang pola belanja yang diarahkan

secara langsung pada peningkatan pelayanan publik, baik secara fisik maupun non fisik akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pendapat yang hampir senada tentang hubungan positif antara belanja sektor publik dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari hasil penelitian Bose et al. (2003) maupun Sutriyono dan Alfirman (2006). Hasil studi Bose et al. (2003) dengan menggunakan data negara-negara berkembang pada periode 1970-1990 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor publik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan hasil studi Sutriyono dan Alfirman (2006) dengan menggunakan data Indonesia tahun 1970-2003, menunjukkan bahwa pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi dan hasil studi Akai dan Sakata (2002) dan juga Wibowo (2008), dimana semakin terdesentralisasinya pengeluaran publik akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Tiebout yang menyarankan agar penyediaan barang dan jasa publik dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan karakter masyarakat di daerahnya, disamping itu proses pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang panjang, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien sehingga akan meningkatkan *output* perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

2) Indikator pendapatan

Indikator Pendapatan RI-1 yang merupakan rasio pendapatan daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat dan Indikator Pendapatan RI-2 yang merupakan rasio pendapatan daerah (tidak termasuk dana perimbangan) terhadap pendapatan pemerintah pusat, menunjukkan hubungan positif

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dimana kedua Indikator Pendapatan tersebut setelah berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal menghasilkan estimasi koefisien yang positif dan signifikan setidaknya pada alpha 5 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pola perimbangan keuangan yang memberikan porsi penerimaan yang lebih besar pada daerah *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001 telah memberikan stimulus positif bagi perbaikan kinerja ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

Kondisi tersebut boleh jadi disebabkan besarnya peningkatan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari transfer dana Pemerintah Pusat *pasca* implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001, telah memberikan insentif dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi, melalui penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah yang dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan *pro-decentralization*, bahwa pelimpahan wewenang yang diikuti dengan pendanaan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan kebutuhan barang publik yang lebih baik dan efisien, sehingga akan meningkatkan *output* perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Namun jika dilihat dari struktur pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi *pasca* implementasi desentralisasi fiskal dimana sebagian besar bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih sangat membutuhkan peran pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari desain desentralisasi fiskal di Indonesia yang merupakan desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui instrumen transfer ke daerah, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil, sementara penerimaan negara sebagian besar tetap dikuasai oleh Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan

bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks desentralisasi fiskal, Jin dan Zhou (2005) menjelaskan bahwa seharusnya pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat haruslah diseimbangkan dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya berkaitan dengan kewenangan perpajakan.

Hasil penelitian ini setidaknya sejalan dengan pendapat Jin dan Zhou (2005) di atas, dimana pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah akan memberikan pengaruh positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dicermati dari hasil regresi atas Indikator Pendapatan, yang menunjukkan koefisien regresi Indikator Pendapatan RI-2 (rasio rasio pendapatan daerah tidak termasuk dana perimbangan terhadap pendapatan pemerintah pusat) yang lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi Indikator Pendapatan RI-1 (rasio pendapatan daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat).

3) Indikator Otonomi/Kemandirian Daerah

Indikator otonomi terdiri dari beberapa ukuran kemandirian daerah yang dalam penelitian ini dinotasikan dengan AI-1, AI-2 dan AI-3, seluruhnya menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dimana ketiga Indikator Otonomi tersebut setelah berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal menghasilkan estimasi koefisien yang positif dan signifikan setidaknya pada alpha 5 persen. Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemandirian daerah yang tercermin dari Indikator AI-1, AI-2 dan AI-3 berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

Hubungan positif antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dijelaskan dari fenomena yang terjadi secara umum saat ini, dimana kebanyakan daerah sangat tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang sebagian besar peruntukannya adalah untuk membiayai belanja aparatur/belanja rutin, sehingga porsi belanja

untuk pembangunan sangat terbatas. Dengan besarnya PAD yang merupakan representasi dari kemandirian daerah, maka daerah mempunyai lebih banyak sumber dana untuk membiayai belanja pembangunannya, dimana belanja pembangunan tersebut merupakan bentuk dari investasi yang merupakan determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan nilai estimasi koefisien indikator otonomi baik A-1, A-2 maupun A-3 yang relatif kecil dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa kontribusi peningkatan kemandirian fiskal daerah di Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi relatif masih kecil. Hal ini tentunya dapat dipahami, mengingat selama hampir sembilan tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bagi Hasil, dimana dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 hampir 85 persen pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berasal dari Dana Perimbangan, dan hanya sekitar 5 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Ketergantungan ini boleh jadi merupakan refleksi dari kurangnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau boleh jadi karena keterbatasan potensi sumber daya daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Merujuk pendapat Kuncoro (2003), terdapat lima penyebab rendahnya PAD yang pada gilirannya akan menyebabkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu: *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. *Ketiga*, walaupun pajak daerah cukup beragam, tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah. *Keempat*, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi dan separatisme jika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi. *Kelima*, adanya kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, merujuk pada hasil penelitian Wibowo

(2008), kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah juga menjadi kendala bagi upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Sedangkan Kemenkeu (2009) menengarai bahwa rendahnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah disebabkan kebijakan dan aturan menyangkut kewenangan perpajakan dan retribusi daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Basis pajak yang terbatas dan kewenangan yang terbatas dalam menetapkan tarif serta sulitnya menemukan jenis pajak dan retribusi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang, telah menyulitkan daerah untuk menyesuaikan penerimaan daerahnya bila dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh pengeluaran daerah.

Pembatasan otonomi dari segi penerimaan tersebut menyebabkan pemerintah daerah cenderung menetapkan berbagai jenis retribusi untuk mengurangi keterbatasan jenis pajak yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Lewis, 2003). Sedangkan kurangnya kompetensi para aparatur dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah dapat berimplikasi pada penetapan instrumen pendapatan daerah yang hanya berorientasi pada peningkatan PAD sehingga mengabaikan perbaikan iklim investasi daerah yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut setidaknya diindikasikan dari adanya sejumlah Peraturan Daerah tentang pungutan daerah di wilayah Provinsi Jambi yang dibatalkan oleh Departemen Dalam Negeri, dimana selama periode 2002 sampai dengan 2008 terdapat 37 perda yang dibatalkan (Kemenkeu, 2009). Untuk itu, Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak sekedar diukur dari jumlah yang dapat dipungut atau diterima, namun harus diukur dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dengan demikian, merujuk pada hasil penelitian ini, dimana indikator kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan disisi lain pemerintah daerah di Provinsi Jambi

memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat, maka upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah. Peningkatan kompetensi aparatur ini menjadi sangat penting dikaitkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar pada daerah di bidang perpajakan dibandingkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Dengan peningkatan kompetensi aparatur ini diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menyesuaikan perda pungutan daerah dengan peraturan yang baru, dan mampu untuk memilih, menginventarisasi, serta menetapkan instrumen pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada gilirannya dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari pembahasan di atas, walaupun hasil regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal (Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi) menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi yang ditunjukkan dari koefisien seluruh variabel desentralisasi fiskal yang menghasilkan nilai estimasi yang positif dan signifikan ketika berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal, namun perlu dicermati bahwa efek total dari Indikator Pengeluaran (EI-1) dan Indikator Pendapatan (RI-1 dan R-2) adalah negatif. Nilai koefisien Indikator Pengeluaran EI-1 secara individu adalah -6,4279, dan 4,5956 setelah berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal, sehingga total nilai koefisien Indikator Pengeluaran EI-1 adalah -1,8323. Demikian halnya dengan total nilai koefisien Indikator pendapatan (RI-1 dan R-2), dimana nilai koefisien Indikator Pendapatan RI-1 secara individu adalah -7,6922, dan 4,4692 setelah berinteraksi dengan variabel *dummy*

desentralisasi fiskal, sehingga total nilai koefisien Indikator Pendapatan RI-1 adalah -3,223. Sedangkan nilai koefisien Indikator Pendapatan RI-2 secara individu adalah -10,7776, dan 8,1203 setelah berinteraksi dengan variabel *dummy* desentralisasi fiskal, sehingga total nilai koefisien Indikator Pendapatan RI-1 adalah -2,6573.

Hubungan yang unik tersebut mengindikasikan bahwa, pola desentralisasi fiskal *pasca* 2001 yang memberikan diskresi yang luas kepada pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing masing daerah telah memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun efek total dari Indikator Pengeluaran dan Indikator Pendapatan yang negatif ini boleh jadi mengindikasikan bahwa belum seluruh belanja pemerintah daerah dialokasikan pada program atau kegiatan yang produktif yang mampu memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2.2. Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel kontrol yang terdiri dari Investasi, *Human Capital*, Pertumbuhan Penduduk, dan PDRB riil per kapita tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

1) Investasi

Hasil regresi atas variabel kontrol pada persamaan (5.1) menunjukkan nilai koefisien regresi variabel investasi adalah sebesar 0,015 dengan probabilitas t-statistic 0,0033. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pada tingkat alpha 1 persen, investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, dimana setiap kenaikan 1 persen nilai investasi maka perekonomian dalam satu tahun berikutnya akan tumbuh sebesar 0,015 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan Alfaro (2003) dan Sodik (2005) yang menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, hal ini disebabkan karena baik PMDN maupun PMA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan persediaan modal dan kapasitas produksi melalui investasi produktif secara langsung dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku baru, maupun investasi dalam bentuk infrastruktur sosial dan ekonomi. Dengan peningkatan kapasitas produksi dan ketersediaan infrastruktur tersebut, diharapkan akan meningkatkan produktivitas *output* nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jhingan (2008) bahwa investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal dan peningkatan kapasitas produksi.

Namun demikian nilai estimasi koefisien variabel investasi yang relatif kecil yaitu 0,015 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dari pertumbuhan jumlah investasi swasta. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan melihat komposisi PMDN dan PMA di Provinsi Jambi yang lebih banyak pada sektor primer yang cenderung padat karya. Investasi di sektor padat karya tentunya akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan jumlah produksi. Namun dalam kondisi tersebut, peningkatan jumlah pekerja akan lebih cepat dari peningkatan modal, sehingga akan sulit untuk mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi. Dengan mengacu pada model pertumbuhan Solow, maka tingkat modal per pekerja yang rendah tersebut berkorelasi dengan *output* per kapita yang rendah.

Disamping itu pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dari pertumbuhan jumlah investasi swasta tersebut boleh jadi disebabkan oleh adanya peraturan yang dibuat pemerintah daerah yang tidak mendukung iklim investasi daerah sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diindikasikan dari fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia *pasca* implementasi desentralisasi fiskal, dimana beberapa perda pungutan daerah yang dibuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, justru

memberatkan para pelaku ekonomi sehingga tidak menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga harus dibatalkan oleh pemerintah pusat. Di wilayah Provinsi Jambi setidaknya selama periode 2002 sampai dengan 2008 terdapat beberapa peraturan daerah terkait dengan pungutan daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PMDN dan PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi terus dilakukan, antara lain dengan penetapan kebijakan atau peraturan daerah yang kondusif terhadap iklim investasi. Selain itu juga perlu dilakukan suatu kajian yang dapat mengidentifikasi sektor unggulan daerah dan besarnya investasi yang diperlukan pada masing-masing sektor dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

2) *Human Capital*

Hasil regresi atas variabel kontrol sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (5.1), menunjukkan nilai koefisien regresi variabel *human capital* adalah sebesar 0,14 dengan probabilitas *t-statistic* 0,002. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pada tingkat alfa 1% *human capital* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, dimana setiap peningkatan *human capital* sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen. Hubungan positif antara *human capital* dan pertumbuhan ekonomi tersebut juga ditunjukkan oleh hasil studi Akai dan Sakata (2002), Wibowo (2008), Aloysius (2002), dan Garcia dan Soelistianingsih (1998).

Namun demikian nilai estimasi koefisien variabel *human capital* yang relatif kecil yaitu 0,14 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja masih dapat meningkatkan jumlah produksi, namun pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap *human*

capital (jumlah dan kualitas tenaga kerja) maka dalam jangka panjang dikhawatirkan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja yang akan berimbas pada penurunan *output* perekonomian.

Untuk itu pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi perlu memberikan perhatian pada peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, dimana peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan ataupun keahlian dan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan efisiensi tenaga kerja yang diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja akan memberikan keuntungan yang berlipat dari peningkatan produksi barang dan jasa (Mankiw, 2007).

3) Pertumbuhan Penduduk

Hasil regresi atas variabel kontrol pada persamaan (5.1) menunjukkan nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,013 dengan probabilitas t-statistic 0,009. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pada tingkat alpha 1 persen pertumbuhan penduduk memiliki hubungan atau pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, dimana setiap peningkatan penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,013 persen.

Hubungan Positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tersebut sesuai dengan pendapat Todaro dan Smith (2006), yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dimana dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif. Sedangkan dari sisi permintaan, penambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan jika dihubungkan dengan hukum *law of diminishing returns*, boleh jadi pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan

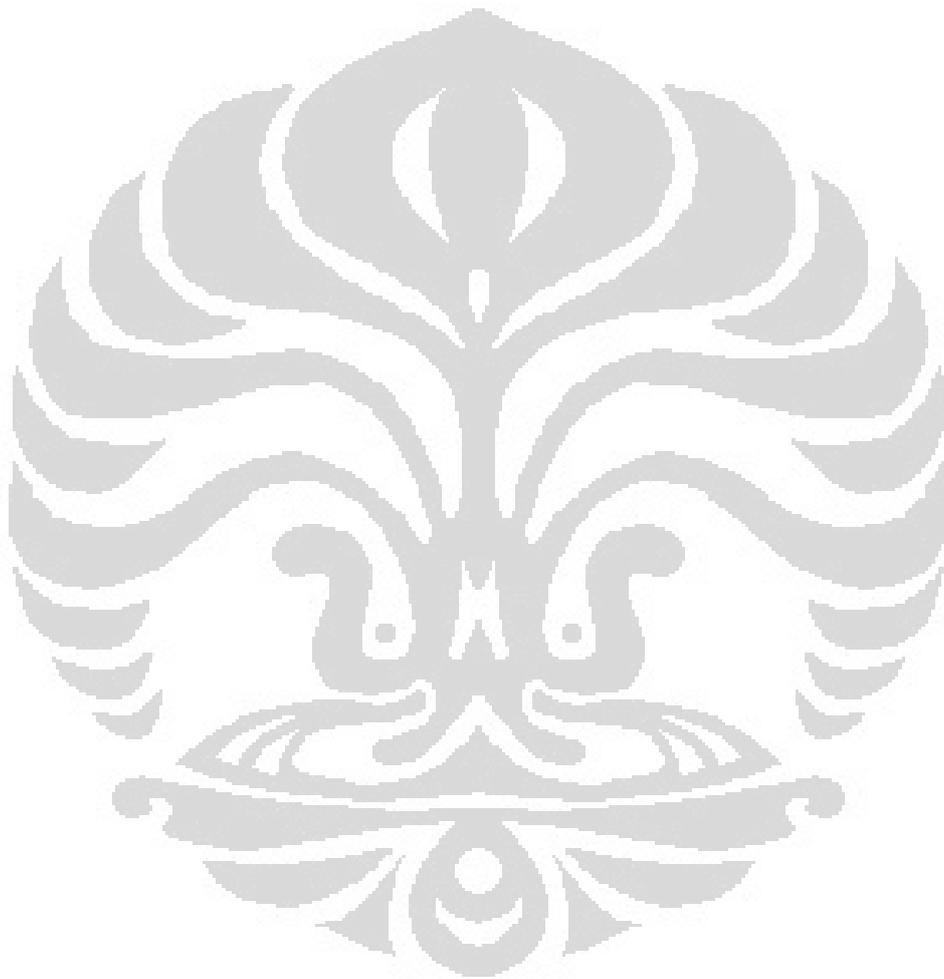
ekonomi tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Jambi belum mencapai jumlah penduduk optimal, yaitu jumlah penduduk dimana pendapatan perkapita mencapai kondisi maksimum, sehingga peningkatan laju pertumbuhan penduduk masih memungkinkan laju pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, pengaruh positif variabel pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak terlepas dari fenomena bonus demografi (*demographic dividend*) yang sedang dinikmati oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Bonus demografi merupakan fenomena peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena peningkatan persentase penduduk usia kerja, dimana periode ini biasanya berlangsung 30-40 tahun dan bervariasi antar wilayah. Dimana Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang akan menikmati bonus demografi tersebut sampai dengan tahun 2025 (FEUI, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat tiga syarat untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pertama, jika pekerja dipekerjakan secara produktif sehingga akan menghasilkan lebih banyak keluaran (*output*). Kedua, jika tabungan ditingkatkan dan diinvestasikan secara produktif sehingga modal akan diakumulasi lebih banyak. Ketiga, jika investasi sumber daya manusia yang sesuai dilakukan sehingga akumulasi modal manusia semakin meningkat.

4) PDRB Per Kapita Periode Sebelumnya

Hasil regresi atas variabel kontrol sebagaimana pada persamaan (5.1) menunjukkan nilai koefisien regresi Variabel PDRB Riil per Kapita Periode Sebelumnya sebesar 0,821 dengan probabilitas t-statistic 0,000. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pada tingkat alpha 1 persen, PDRB Riil per Kapita Periode Sebelumnya memiliki hubungan atau pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, dimana setiap peningkatan 1 persen PDRB Riil per Kapita Periode Sebelumnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,821 persen.

Hubungan positif antara PDRB Riil per Kapita Periode Sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan hasil yang dilakukan studi Akai dan Sakata (2002), dimana PDRB Riil per Kapita Periode Sebelumnya merupakan determinan penting yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, selama periode penelitian 1995-2009 masih didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih dibawah 6% dari total penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi mempunyai ketergantungan fiskal yang tinggi.
2. Dalam konteks desentralisasi fiskal, struktur belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang cukup baik *pasca* implementasi desentralisasi fiskal, hal ini dapat dilihat dari perkembangan belanja untuk pelayanan publik yang cenderung meningkat. Porsi belanja pelayanan publik tahun 2008 yang tercermin dari belanja langsung seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi mencapai angka 59,25 persen dari total belanja, meningkat dibandingkan dengan porsi belanja pelayanan publik pada awal implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001 yang hanya sebesar 27,82 persen. Pergeseran pola belanja daerah yang lebih mengarah pada peningkatan belanja pelayanan publik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan program pembangunan daerah, sehingga akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatan kinerja perekonomian daerah di Provinsi Jambi.

3. Hasil analisis hubungan antara pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan metode GLS dan model estimasi *Fixed Effect* menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dimplementasikan sejak tahun 2001 ternyata memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini terlihat dari Indikator Desentralisasi Fiskal yang terdiri dari Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi yang digunakan sebagai *proxy* dari desentralisasi fiskal, seluruh menunjukkan tanda positif dan signifikan setelah berinteraksi dengan variabel dummy desentralisasi fiskal.
4. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil regresi atas indikator desentralisasi fiskal, yaitu:
 - a. Hasil regresi atas Indikator Pendapatan, menunjukkan koefisien regresi Indikator Pendapatan RI-2 (rasio rasio pendapatan daerah tidak termasuk dana perimbangan terhadap pendapatan pemerintah pusat) lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi Indikator Pendapatan RI-1 (rasio total pendapatan daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat). Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah akan memberikan pengaruh positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.
 - b. Hasil regresi atas Indikator Otonomi, menunjukkan nilai estimasi koefisien Indikator Otonomi yang relatif kecil dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum efektif dalam memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Boleh jadi karena upaya tersebut lebih berorientasi pada peningkatan jumlah PAD yang dipungut, dan bukannya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Hasil penelitian lainnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa, seluruh variabel kontrol yang secara empiris merupakan determinan pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita tahun sebelumnya, berpengaruh positif dan signifikan. Beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil regresi atas variabel kontrol ini adalah:
- a. Nilai koefisien regresi variabel *human capital* yang relatif kecil yaitu 0,14 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja masih dapat meningkatkan jumlah produksi, namun pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.
 - b. Nilai estimasi koefisien variabel investasi yang relatif kecil yaitu 0,015, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dari pertumbuhan jumlah investasi. Hal ini terkait dengan investasi di Provinsi Jambi yang lebih banyak pada sektor primer yang cenderung padat karya, sehingga modal per pekerja lebih rendah. Tingkat modal per pekerja yang rendah tersebut berkorelasi dengan *output* per kapita yang rendah.

6.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam konteks desentralisasi fiskal seyogyanya pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat haruslah diseimbangkan dengan pemberian kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya berkaitan dengan kewenangan perpajakan.

2. Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih efektif dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan ukuran keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya dari jumlah yang dapat dipungut atau diterima, namun juga dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
3. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, sangat penting bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk memberikan perhatian pada peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut antara lain dapat dilakukan melalui program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keahlian dan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan output perekonomian.
4. Peningkatan investasi pada sektor primer yang cenderung padat karya (menyerap banyak tenaga kerja) harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang diiringi dengan peningkatan efisiensi tenaga kerja yang diiringi akan memberikan keuntungan yang berlipat terhadap output perekonomian. Disamping itu usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi harus terus dilakukan, antara lain dengan:
 - a. Menetapkan kebijakan atau peraturan daerah yang kondusif terhadap iklim investasi.
 - b. Melakukan kajian untuk mengidentifikasi sektor unggulan daerah dan besarnya investasi yang diperlukan pada masing-masing sektor dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo, & Sakata, Masayo. (2002). Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93–108.
- Alfaro, Laura. (2003). Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter?. Harvard Business School.
- Alfirman, Luky, & Sutriyono, Edy. (2006). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4 No 1.
- Bank Indonesia. (2010). Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jambi Triwulan I-2010. Kantor Bank Indonesia Jambi.
- Barry W. Poulson, & Jules Gordon Kaplan. (2008). State Income Taxes and Economic Growth. *Cato Journal*, Vol. 28.
- Baskaran, T., & Feld, P Lars. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship? *Cesifo Working Paper* No. 2721.
- Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. *Policy Sciences*, 24: 271 – 290.
- Bird, Richard M., & Francois Vailancourt. (2000). Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang, Jakarta, PT Gramedia Pustaka utama.
- Bose, N., Emranul Haque M., & Osborn D. (2003). Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries. University of Manchester.
- BPPK. (2006). Keuangan Daerah—Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: Tim LPKPAP.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 7(2) : 113-122.
- Dale Weldeau Jorgenson, Frank M. Gollop, & Barbara M. Fraumeni. (1987). Productivity and U.S. Economic Growth. Harvard University Press.
- Davoodi, H., & Zou, Heng-fu. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43:244-57.
- Desai, R. M., Freinkman, L.M., & Goldberg, I. (2003). Fiscal Federalism and Regional Growth Evidence from Russian Federation in the 1990s. *World Bank Policy Research Working Paper* 3138, World Bank, Washington DC.
- FEUI. (2009). Indonesia Economic Outlook 2010. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Garcia, J.G., & L. Soelistianingsih. (1998). Why Do Differences in Provincial Income Persist in Indonesia? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34 (1): 95-120.
- Gujarati, N Damodar. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw–Hill Companies.
- Halder, Pragna. (2007). Measures of Fiscal Decentralization. Departement of Economic, Andrew Young School, Georgia State University.
- Jhingan, ML. (2008). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khusaini, Mohammad. (2006). Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Strategi, Perencanaan dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions. *American Economic Review*, LXXXII (4):942-63.
- Lewis, B.D. (2003). Tax and Charge Creation by Regional Governments under Fiscal Decentralisation: Estimates and Explanations. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2): 177-192.
- Lim, D. (1996). Explaining Economic Growth: A New Analitical Framework. Vermont: Edward Elgard Publish, Co.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). Makroekonomi (Liza Fitria & Nurmawan Imam, Penerjemah), Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008. Dalam Abimanyu, Anggito & Megantara, Andie. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mawhood, P. (1987). Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- Prud'homme, R. (1994). On the Dangers of Decentralization. *Policy Research Working Paper 1252*. World Bank, Washington D.C.
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta.
- Sodik, Jamzani, & Nuryadin, Didi. (2005). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi regional (Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10(2), 157-170.
- Sturm, J. E. (1998). Public Capital Expenditure in OECD Countries: The Causes And Impact Of The Decline In Public Capital Spending. Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham.
- Schweke, William. (2004). Smart Money: Education and Economic Development. *Economic Policy Institute*.

- Swasono, Fauziah. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 55(2).
- Tanzi, V. (1996). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. *Annual World Bank Conference on Development Economics*. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
- Ter-Minassian, Teresa. (1997). *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. Washington, International Monetary Fund.
- Thiessen, Ulrich. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries. *Fiscal Studies* Vol. 24 No. 3.
- Todaro, Michael P., & Smith Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Yelvi Andri, Penerjemah), Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2008). *Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*.
- Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- Widarjono, Agus. (2007). Ekonometrika: Teori. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008.
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008.
- Woller, M. Gary, & Phillips Kerk. (1998). Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion. *The Journal of Development Studies*; Vol.34(4).
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45:228-239.
- Yamoah, Afia Boadiwaa. (2007). *The Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties*. *Dessertation*, The Ohio State University.
- Zhang Tao, & Zou Heng-Fu. (1998). Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure*, 67: 221- 240.

Lampiran 1

Hasil Regresi Atas Variabel Kontrol

Dependent Variable: LOG(PDRBPC?)				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 01/13/12 Time: 22:10				
Sample: 1996 2009				
Included observations: 14				
Number of cross-sections used: 9				
Total panel (unbalanced) observations: 102				
One-step weighting matrix				
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB_AWAL?)	0.820892	0.069309	11.84397	0.0000
LOG(HUMANCAP?)	0.136326	0.042894	3.178241	0.0020
LOG(INVESTASI?(-1))	0.014686	0.004870	3.015548	0.0033
POPGROWTH?	0.012681	0.004776	2.655197	0.0094
Fixed Effects				
_KOTAJAMBI—C	0.967434			
_MUARJAMBI—C	1.018138			
_BATANGHARI—C	1.110832			
_TANJABBAR—C	1.197445			
_TANJABTIM—C	1.404668			
_SAROLANGUN—C	1.200225			
_MERANGIN—C	1.056126			
_BUNGO—C	1.076463			
_TEBO—C	1.126064			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999905	Mean dependent var	23.83515	
Adjusted R-squared	0.999892	S.D. dependent var	15.05650	
S.E. of regression	0.156231	Sum squared resid	2.172336	
Log likelihood	78.53986	F-statistic	78164.52	
Durbin-Watson stat	2.363858	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.910115	Mean dependent var	15.14297	
Adjusted R-squared	0.897995	S.D. dependent var	0.501561	
S.E. of regression	0.160189	Sum squared resid	2.283791	
Durbin-Watson stat	2.088038			

Hasil Regresi atas Variabel Dummy Desentralisasi Fiskal

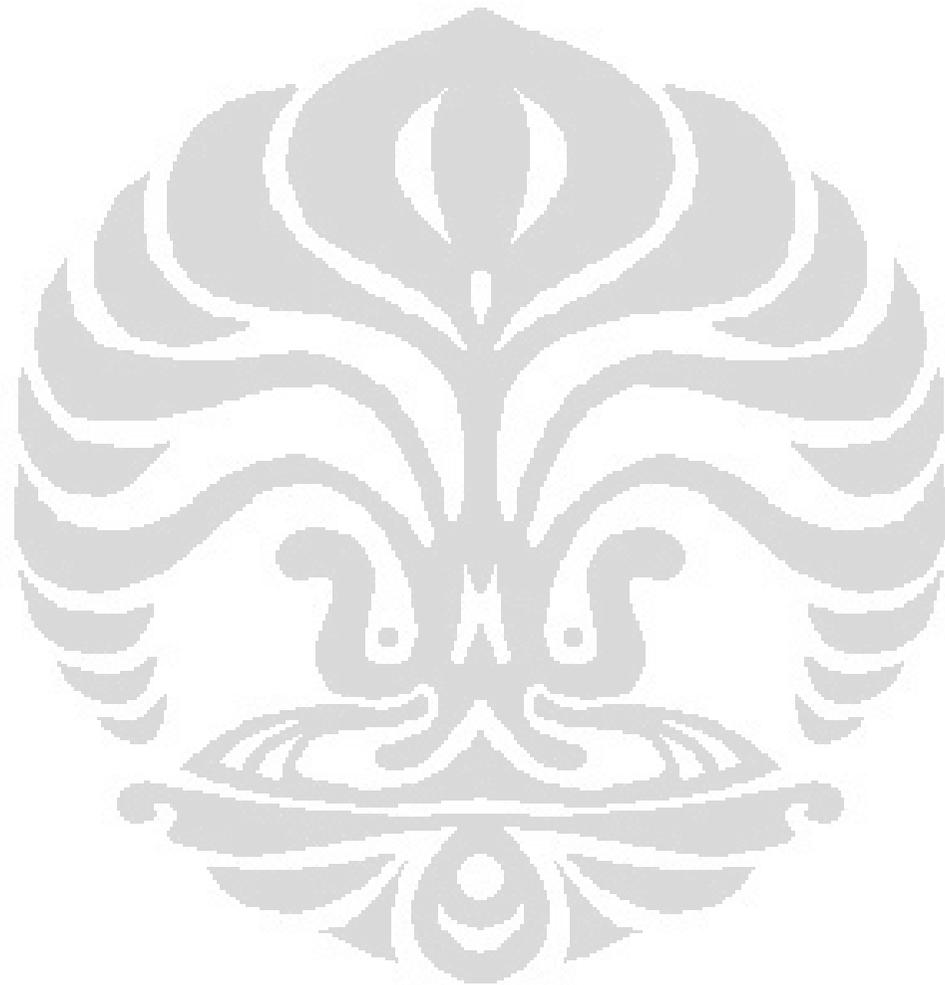
Dependent Variable: LOG(PDRBPC?)				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 01/13/12 Time: 22:15				
Sample: 1996 2009				
Included observations: 14				
Number of cross-sections used: 9				
Total panel (unbalanced) observations: 102				
One-step weighting matrix				
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB_AWAL?)	0.695208	0.081459	8.534403	0.0000
LOG(HUMANCAP?)	0.131399	0.041332	3.179096	0.0020
LOG(INVESTASI?(-1))	0.015357	0.005868	2.616900	0.0104
POPGROWTH?	0.012093	0.004575	2.643558	0.0097
DUMMYDF?	0.149198	0.051449	2.899934	0.0047
Fixed Effects				
_KOTAJAMBI—C	2.863835			
_MUARJAMBI—C	2.800000			
_BATANGHARI—C	2.932328			
_TANJABBAR—C	3.069324			
_TANJABTIM--C	3.304809			
_SAROLANGUN--C	3.006477			
_MERANGIN--C	2.846245			
_BUNGO--C	2.873011			
_TEBO--C	2.879121			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999884	Mean dependent var	21.35131	
Adjusted R-squared	0.999867	S.D. dependent var	13.02293	
S.E. of regression	0.150230	Sum squared resid	1.986065	
Log likelihood	77.35283	F-statistic	58376.03	
Durbin-Watson stat	2.292583	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.918661	Mean dependent var	15.14297	
Adjusted R-squared	0.906645	S.D. dependent var	0.501561	
S.E. of regression	0.153247	Sum squared resid	2.066656	
Durbin-Watson stat	2.170050			

Ikhtisar Hasil Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal

Variabel Independen	Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal EI-1		Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal RI-1		Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal RI-2		Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal AI-1		Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal AI-2		Regresi dengan Indikator Desentralisasi Fiskal AI-3	
	coeficient	std. Error										
EI-1	-8,4279	1,8847***										
EI-1*dummy DF	4,5958	1,2428***										
RI-1			-7,6922	1,9844***								
RI-1*dummy DF			4,4692	1,1827***								
RI-2					-10,7776	5,2999**						
RI-2*dummy DF					8,1203	4,0085**						
AI-1							0,0024	0,0026				
AI-1*dummy DF							0,0048	0,0017***				
AI-2									0,0025	0,0026		
AI-2*dummy DF									0,0041	0,0016**		
AI-3											0,0008	0,0020
AI-3*dummy DF											0,0031	0,0013**
PDRB_AWAL	0,7130	0,0852***	0,6733	0,0907***	0,8070	0,0716***	0,7997	0,0721***	0,8085	0,0717***	0,8088	0,0720***
HUMANCAP	0,1781	0,0551***	0,1578	0,0467***	0,0998	0,0492**	0,1274	0,0468***	0,1318	0,0462***	0,1244	0,0480**
INVESTASI(-1)	0,0182	0,0070**	0,0096	0,0057*	0,0071	0,0059	0,0159	0,0087**	0,0179	0,0072**	0,0148	0,0087**
POPGROWTH	0,0109	0,0053**	0,0140	0,0051***	0,0124	0,0049**	0,0115	0,0045**	0,0107	0,0046**	0,0119	0,0046**
Adjusted R2	91,66		91,62		89,75		89,84		89,86		89,75	
Prob. F-Statistic	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
DW-Stat	2,1701		2,4952		2,0881		2,1463		2,1626		2,1387	
N	102		102		102		102		102		102	

Sumber : *output eviws*

Catatan : tanda asterik menunjukkan tingkat signifikansi pada $\alpha=1\%$ (***), $\alpha=5\%$ (**), dan $\alpha=10\%$ (*)



Hasil Uji Multikolinieritas

1. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Variabel Kontrol

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas				
	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000

sumber: output eviews

2. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Variabel Dummy

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas					
	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,5193
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	-0,1175
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	-0,0288
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0099
DUMMYDF	0,5193	-0,1175	-0,0288	0,0099	1,0000

sumber: output eviews

(Lanjutan Lampiran 4)

3. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal EI-1

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	EI-1	EI-1*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,5438	0,5942
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,1743	0,0345
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	0,0158	0,0063
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0059	0,0172
EI-1	0,5438	0,1743	0,0158	0,0059	1,0000	0,8952
EI-1*DUMMYDF	0,5942	0,0345	0,0063	0,0172	0,8952	1,0000

sumber: output eviws

4. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal RI-1

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	RI-1	RI-1*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,2947	0,5578
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,2923	0,0250
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	0,0246	0,0030
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0252	0,0292
RI-1	0,2947	0,2923	0,0246	0,0252	1,0000	0,6096
RI-1*DUMMYDF	0,5578	0,0250	0,0030	0,0292	0,6096	1,0000

sumber: output eviws

(Lanjutan Lampiran 4)

5. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal RI-2

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	RI-2	RI-2*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,2390	0,3789
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,3041	0,1313
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	-0,1187	-0,0328
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0080	0,0320
RI-2	0,2390	0,3041	-0,1187	0,0080	1,0000	0,8488
RI-2*DUMMYDF	0,3789	0,1313	-0,0328	0,0320	0,8488	1,0000

sumber: output eviws

6. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-1

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	AI-1	AI-1*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,1824	0,3299
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,5041	0,1593
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	-0,1706	-0,0045
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0576	0,0745
AI-1	0,1824	0,5041	-0,1706	0,0576	1,0000	0,5421
AI-1*DUMMYDF	0,3299	0,1593	-0,0045	0,0745	0,5421	1,0000

sumber: output eviws

(Lanjutan Lampiran 4)

7. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-2

Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	AI-2	AI-2*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,1318	0,2918
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,4767	0,1425
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	-0,1734	-0,0140
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0551	0,0731
AI-2	0,1318	0,4767	-0,1734	0,0551	1,0000	0,5539
AI-2*DUMMYDF	0,2918	0,1425	-0,0140	0,0731	0,5539	1,0000

sumber: output eviews

8. Uji Multikolinieritas pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-3

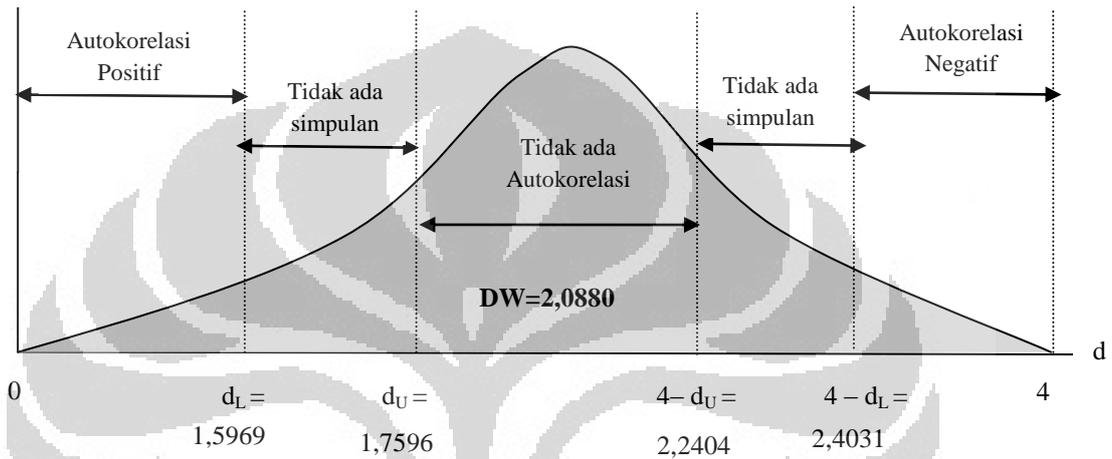
Matriks Korelasi antar Variabel Bebas						
Vaiabel	Ln(PDRB_AWAL)	Ln(HUMANCAP)	Ln(INVESTASI(-1))	POPGROWTH	AI-3	AI-3*DUMMYDF
Ln(PDRB_AWAL)	1,0000	0,0421	0,0292	-0,0215	0,1785	0,3083
Ln(HUMANCAP)	0,0421	1,0000	-0,0332	-0,0067	0,4829	0,1606
Ln(INVESTASI(-1))	0,0292	-0,0332	1,0000	0,2545	-0,1811	-0,0102
POPGROWTH	-0,0215	-0,0067	0,2545	1,0000	0,0592	0,0802
AI-3	0,1785	0,4829	-0,1811	0,0592	1,0000	0,5655
AI-3*DUMMYDF	0,3083	0,1606	-0,0102	0,0802	0,5655	1,0000

sumber: output eviews

Hasil Uji Autokorelasi dengan Statistik Durbin Watson

1. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Variabel Kontrol

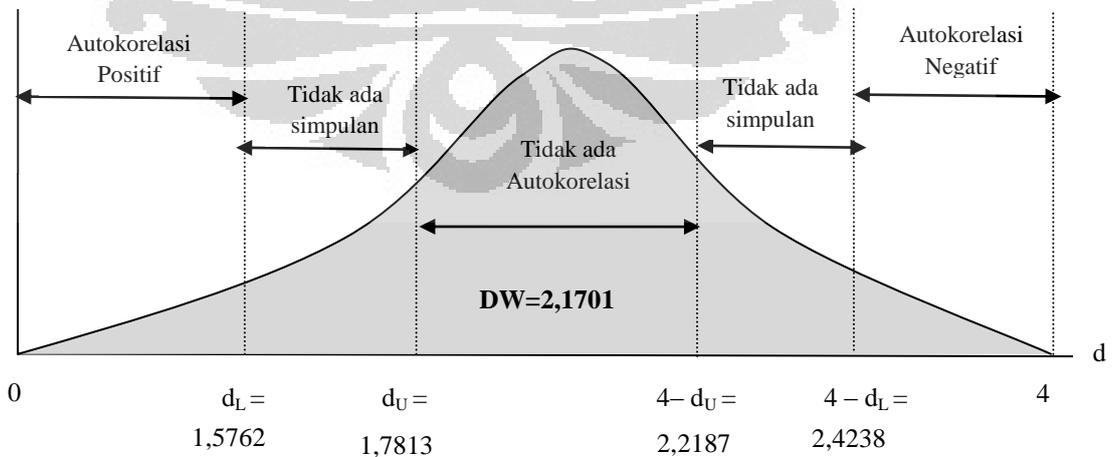
f(d)



Sumber: hasil olahan data, eviews.

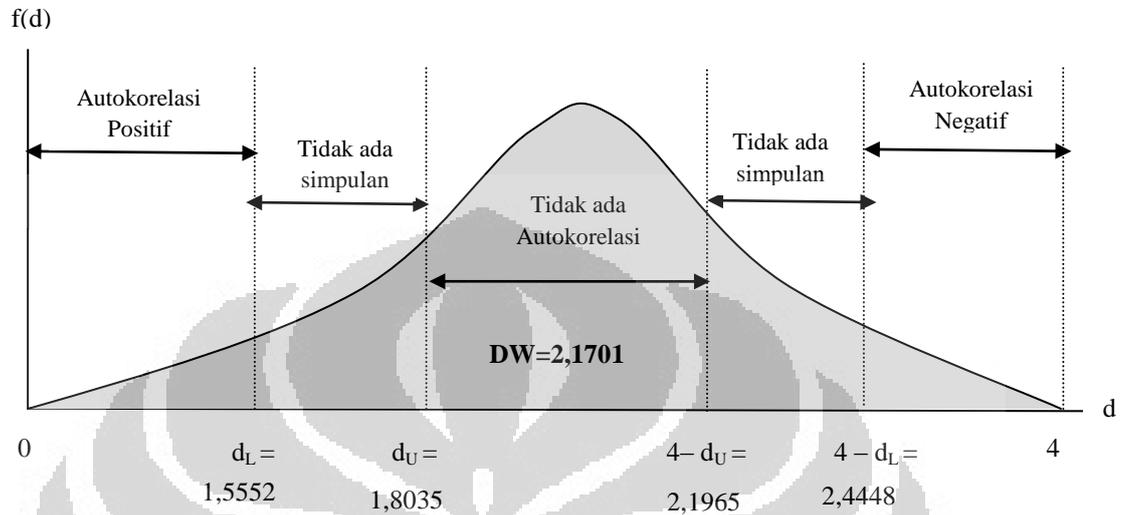
2. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Dummy Variabel

f(d)



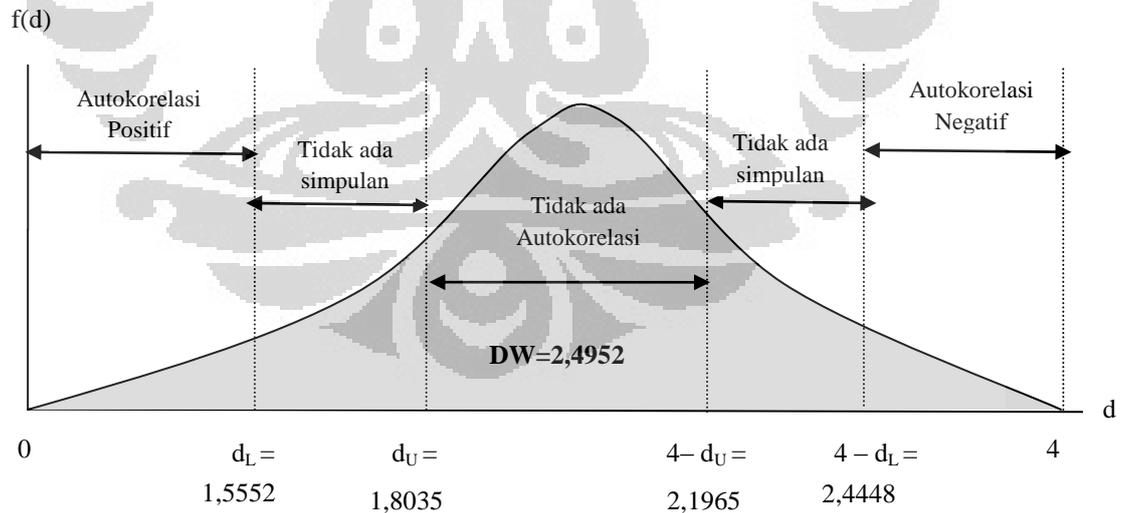
Sumber: hasil olahan data, eviews.

3. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal EI-1



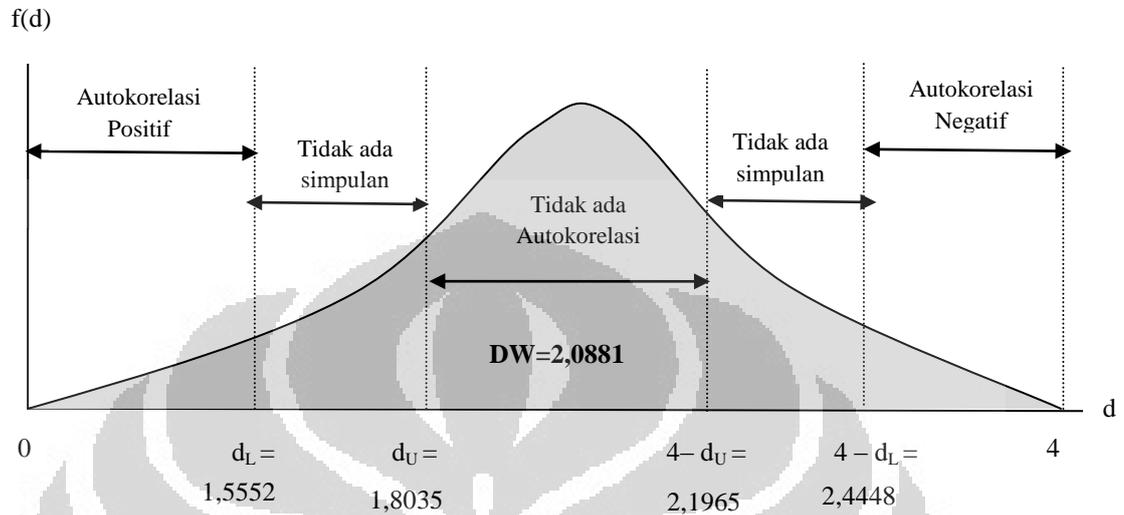
Sumber: hasil olahan data, eviews.

4. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal RI-1



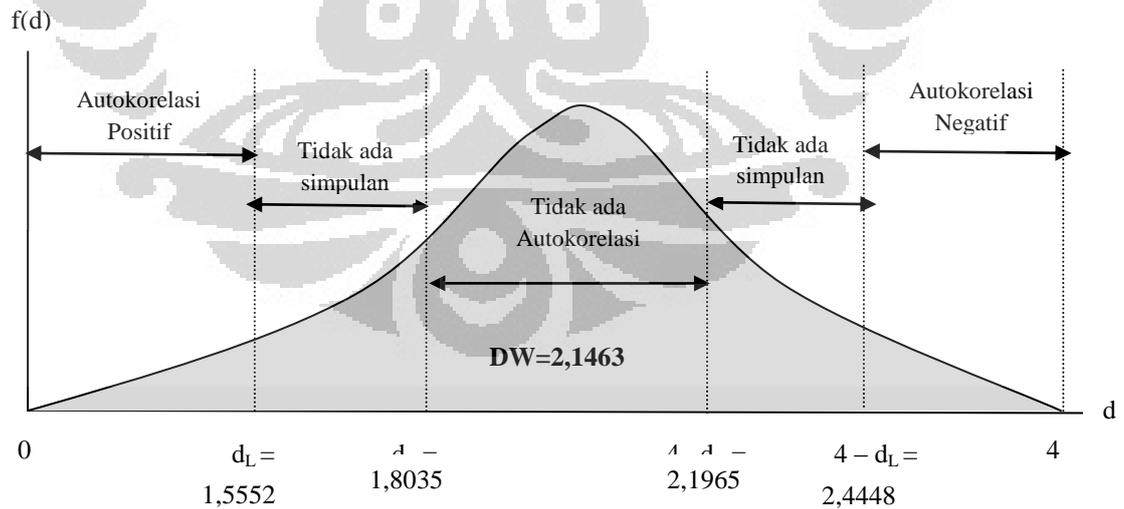
Sumber: hasil olahan data, eviews.

5. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal RI-2



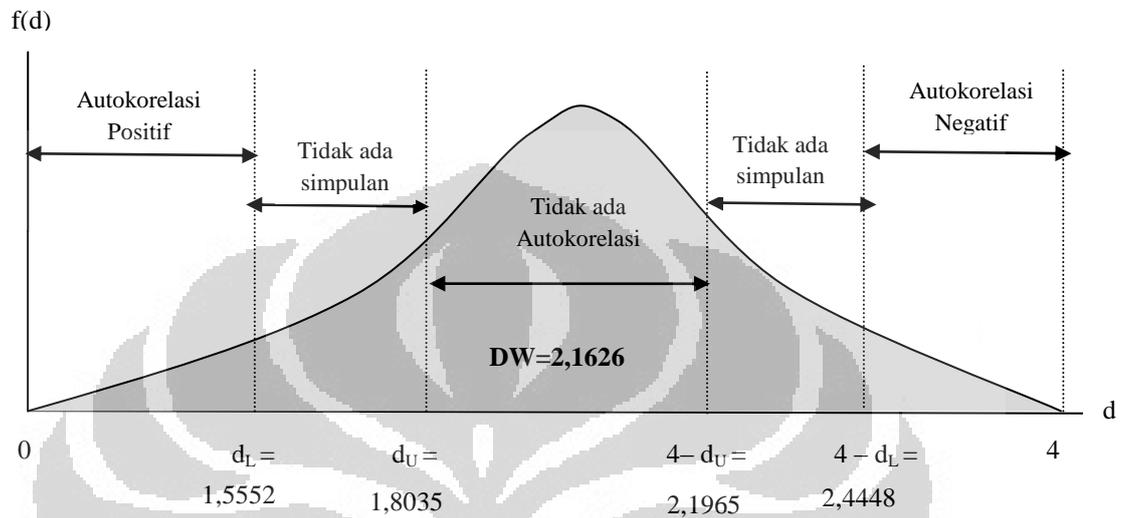
Sumber: hasil olahan data, eviews.

6. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-1



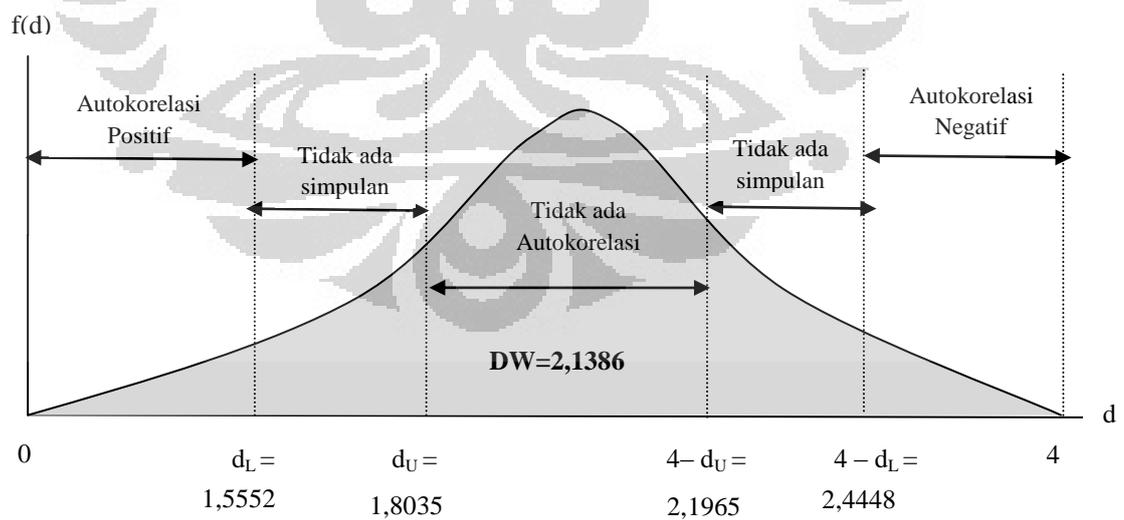
Sumber: hasil olahan data, eviews.

7. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-2



Sumber: hasil olahan data, eviews.

8. Uji Autokorelasi pada Regresi atas Indikator Desentralisasi Fiskal AI-3



Sumber: hasil olahan data, eviews.